

**KEGAGALAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI PEMERINTAH YAMAN
DALAM MENGATASI KRISIS PANGAN PADA ARAB SPRING TAHUN**

2011-2014

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD FANDI FADHLI

18323150

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**KEGAGALAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI PEMERINTAH YAMAN
DALAM MENGATASI KRISIS PANGAN PADA ARAB SPRING TAHUN**

2011-2014

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUHAMMAD FANDI FADHLI

18323150

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
KEGAGALAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI PEMERINTAH
YAMAN DALAM MENGATASI KRISIS PANGAN PADA ARAB
SPRING TAHUN 2011-2014

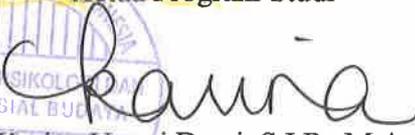
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan
Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
24 Agustus 2023

Mengesahkan

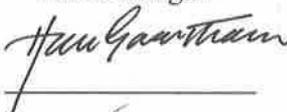
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi


Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

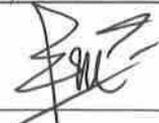
Dewan Penguji

- 1 Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A
- 2 Willi Ashadi, S.H.I., M.A.
- 3 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan







PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink is written over a pink and white QR code stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "METERAI 10000" and "SERULUH DIBAYAR".

Muhammad Fandi Fadhli

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	14
1.8 Metode Penelitian	14
<i>1.8.1. Jenis penelitian</i>	14
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	15
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	15
<i>1.8.4 Proses Pengumpulan Data</i>	15
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17
KONTEKS PANGAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH YAMAN TERHADAP KRISIS PANGAN	17
2.1. Kondisi Pangan di Yaman	17
2.1.1 Krisis Pangan di Yaman	18
2.1.2 Harga Pangan di Yaman	19
2.2 Upaya Pemerintah Yaman	20
2.2.1 Kebijakan National Food Security System (NFSS)	21
2.2.2 Program Transitional Program for Stabilization and Development (TPSD)	23

BAB III	27
ANALISIS	27
3.1. Politik Domestik	27
3.1.1 Kepentingan Houthi	27
3.1.2 Birokrasi Yaman	32
3.1.3 Kepentingan Partai Politik di Yaman	33
3.1.4 Media Massa	36
3.2 Kapasitas Ekonomi dan Militer	37
3.2.1 Kapasitas Ekonomi	37
3.2.2 Kapasitas Militer	41
3.3 Konteks Internasional	43
3.3.1 Arab Spring di Yaman	43
3.3.2 Peran WFP di Yaman	47
BAB IV	51
4.1. Kesimpulan	51
4.2 Rekomendasi	54
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Teori <i>Decision Making</i>	19
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah penduduk Yaman rawan pangan.....	21
Tabel 2. Pemberitaan media terhadap pemerintah Yaman.....	36
Tabel 3. Ringakasan Analisis	37

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Grafik pertumbuhan GNP di Yaman 2011-2014.....	40
--	----

DAFTAR SINGKATAN

GPC	: General People's Congress
IFPRI	: International Food Policy Institute
NFSS	: National Food Security System
TPSD	: Transitional Program for Stabilization and Development
UNICEF	: United Nations International Children's Fund
USD	: United States Dollar
WFP	: World Food Programme
WHF	: World Humanitarian Fund
YER	: Yemen Rial
YSP	: Yemen Social Party

ABSTRAK

Konflik di Yaman telah mempengaruhi kondisi perekonomian dan akses terhadap makanan sehingga menyebabkan terjadinya krisis pangan. Salah satu faktor penyebab kegagalan pemerintah Yaman dalam mengatasi krisis pangan adalah kekacauan politik yang disebabkan oleh Arab Spring pada tahun 2011. Revolusi Yaman telah menyebabkan Yaman mengalami penurunan produksi dan kenaikan harga pangan. Maka, untuk menganalisa krisis pangan di Yaman, penulis menggunakan teori *foreign policy* dari William D. Coplin. Teori Coplin memberikan tiga faktor utama yang mempengaruhi kepentingan kebijakan luar negeri, yaitu situasi politik domestik, kondisi ekonomi dan militer, serta konteks internasional. Secara hipotesis, ketiga faktor tersebut mempengaruhi kegagalan kebijakan pemerintah Yaman dalam mengatasi krisis pangan. Adapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah Yaman, meliputi *National Food Security System* (NFSS) dan *Transitional for Programme and Stabilization Development* (PTSD). NFSS dilaksanakan pada tahun 2011 namun berhenti setelah satu tahun berjalan. Sedangkan, PTSD dilaksanakan pada tahun 2012. Akan tetapi, kedua program ini gagal diimplementasikan oleh Yaman dalam mengatasi krisis pangan.

Kata Kunci: Krisis Pangan, Yaman, Kegagalan Kebijakan.

ABSTRACT

The conflict in Yemen has affected economic conditions and access to food, causing a food crisis. One of the factors causing the failure of the Yemeni government to overcome the food crisis is the political turmoil caused by the Arab Spring in 2011. The Yemeni revolution has caused Yemen to experience a decrease in production and an increase in food prices. So, to analyze the food crisis in Yemen, the author uses foreign policy theory from William D. Coplin. Coplin's theory provides three main factors that influence foreign policy interests, namely the domestic political situation, economic and military conditions, and the international context. Hypothetically, these three factors influence the failure of the Yemeni government's policies in overcoming the food crisis. The policies adopted by the Yemeni government include the National Food Security System (NFSS) and the Transitional Program for Stabilization and Development (PTSD). The NFSS was implemented in 2011 but stopped after one year. Meanwhile, PTSD was implemented in 2012. However, these two programs failed to be implemented by Yemen in overcoming the food crisis.

Keywords: Food Crisis, Yemen, Failure, Policy Failure.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Yaman adalah negara Arab termiskin di dunia. Negara ini memiliki sekitar 27,4 juta orang dengan sumber daya alam kronis dan kekurangan makanan. Banyak data dari Organisasi Internasional melaporkan krisis kemanusiaan di Yaman termasuk krisis pangan. Menurut *World Food Programme* sekitar 7.3 juta orang Yaman membutuhkan makanan yang layak, dan menurut *UNICEF* sebanyak 462.000 anak di Yaman menderita gizi buruk yang akut. *World Health Organization* melaporkan bahwa 14.2 juta orang Yaman kekurangan bahan obat-obatan dan lebih dari 2 juta pengungsi Yaman yang mengungsi (WFP 2023). Warga Yaman mengalami kekurangan makanan. Dari data tersebut Yaman mengalami krisis kemanusiaan terburuk di dunia (Niaz 2019).

Konflik di Yaman telah mempengaruhi kondisi ekonomi serta aksesibilitas makanan secara signifikan. Aksesibilitas makanan telah menurun secara signifikan yang ini akan mengancam nyawa warga. Konflik semakin mempersulit pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Situasi internal yang kondusif maupun tidak kondusif mempengaruhi kondisi ekonomi. Timur Tengah dan Afrika Utara secara keseluruhan sangat rentan terhadap kerawanan pangan dan kerusakan yang diakibatkannya. Ada berbagai alasan untuk kerentanan ini, yang paling menonjol adalah ketergantungannya pada pasar internasional untuk pangan. Karena kelangkaan relatif dari tanah dan air yang dapat ditanami, wilayah Timur Tengah

dan Afrika Utara mengimpor lebih dari setengah makanannya, ketergantungan impor yang lebih tinggi daripada wilayah lain manapun di dunia (Tree 2014).

Krisis kemanusiaan di Yaman berujung kepada krisis pangan di daerah tersebut. Ini diakibatkan karena peristiwa konflik keterusan berlanjut hingga mengakibatkan krisis pangan terjadi. Pada tahun 2011 di Timur Tengah tepatnya di negara Yaman terjadi suatu peristiwa dahsyat yang dikenal dengan Arab Spring. Revolusi Arab Spring memicu gelombang demonstrasi terhadap kegagalan pemerintah Yaman dalam menjalankan tugasnya yaitu memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial. Demonstrasi dilakukan oleh masyarakat Yaman untuk menentang konstitusi Yaman bernama *popular referendum* yang dinilai tidak demokratis. Revolusi Yaman mengakibatkan kekacauan publik yang berujung jatuhnya rezim presiden Ali Abdullah Saleh pada tahun 1990-2012. Gejolak revolusi Arab Spring yang menjadi awal untuk mengakhiri rezim otoritarianisme. Revolusi ini bermula dengan para pemuda Yaman memulai protes di ibukota Sana'a untuk perubahan pemerintah yang lebih baik (Phillips 2015).

Alasan munculnya Arab Spring di Yaman bukan hanya pergolakan politik, tetapi lebih karena penyebab dan masalah sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Masalah sosial dan ekonomi menyebabkan dampak yang sangat signifikan bagi negara Yaman. Dampak yang disebabkan dari konflik Arab Spring seperti pengangguran, kemiskinan, ekonomi yang memburuk, kesehatan, hingga pendidikan. Terdapat sekitar 40% dari populasi negara yang terdiri dari 23 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Sumber-sumber PBB menunjukkan bahwa, tingkat pengangguran di Yaman mencapai 31,5% dari populasi yang tidak memiliki ketahanan pangan. Bahkan, sebesar 12% dari populasi tersebut mengalami

kekurangan pangan. Sehingga, konflik Arab Spring merupakan salah satu penyebab semakin memburuknya kondisi pangan di Yaman (Altamimi dan Venkatesha 2020).

Dengan ketidakstabilan politik telah mengakibatkan harga produk tinggi. Program pangan dunia PBB pada 2012 menyatakan bahwa lebih dari 10 juta orang. 44% dari populasi adalah rawan pangan, 5 juta di antaranya sangat rawan pangan tidak dapat memproduksi atau membeli makanan yang mereka butuhkan. Malnutrisi anak termasuk yang tertinggi di dunia, dengan hampir setengah dari anak balita (2 juta) mengalami kekurangan gizi kronis (WFP 2012).

Selama Arab Spring berlangsung memiliki dampak terhadap krisis pangan di Yaman terganggunya ketersediaan, aksesibilitas, dan penggunaan pangan sehingga menimbulkan kerusuhan. Pemerintah Yaman kesulitan dalam aksesibilitas makanan karena urbanisasi, kemiskinan, sektor swasta yang lemah, dan populasi pemuda yang semakin melonjak dan menganggur membuat semakin sulit bagi negara untuk menyediakan ketahanan pangan yang stabil bagi rakyatnya. Faktor-faktor ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi stabilitas politik. Krisis pangan biasanya menghasilkan kelangkaan pangan yang meluas di suatu masyarakat. Hal ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor seperti gagal panen, ledakan penduduk, kebijakan pemerintah, dan kelambanan dalam hal produksi pangan. Krisis pangan biasanya mengakibatkan kelaparan, kelaparan dan kekurangan gizi di masyarakat. Oleh karena itu, krisis pangan merupakan pendorong utama serbuan dan akuisisi lahan di Afrika (Fytrou 2013).

Salah satu faktor dari penyebab kegagalan pemerintah Yaman dalam mengatasi krisis pangan adalah kekacauan sipil yang disebabkan oleh *Arab Spring*

yang menuntut adanya reformasi politik pada tahun 2011. Revolusi Yaman telah menyebabkan Yaman mengalami krisis pangan. Akibat dari Revolusi ini, Yaman mengalami penurunan produksi dan kenaikan harga pangan (Sadewi, Dewi dan Suwecawangsa 2018).

Oleh sebab itu, untuk mengatasi krisis pangan tersebut Yaman akhirnya membuat kebijakan pada tahun 2011 yang bernama *National Food Security System* (NFSS). Dalam kebijakan ini memiliki 7 poin dan Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi krisis pangan dan mewujudkan ketahanan pangan pada tahun 2015-2020. Ketujuh komponen dalam kebijakan tersebut tidak sejalan semestinya karena tidak adanya anggaran dana yang tersedia dan meskipun ada dukungan teknis dari Uni Eropa sehingga penerapan NFSS kemudian diberhentikan (Oxfam 2011). Maka, pada tahun 2012 akhirnya kebijakan ini berhenti dilanjutkan yang hanya berjalan selama 1 tahun.

Pada tahun 2012 pemerintah Yaman membuat suatu program untuk membangun stabilitas ekonomi dan kebutuhan mendesak yaitu *Transitional for Programme and Stabilization Development* (TPSD). Kebijakan TPSD memiliki 4 program prioritas yaitu pertama menyelesaikan perpindahan kekuasaan secara damai dan memulihkan stabilitas politik; kedua mencapai stabilitas keamanan dan meningkatkan aturan hukum; ketiga memenuhi kebutuhan dan material untuk masyarakat; dan menggapai stabilitas ekonomi. Meskipun kebijakan memprioritaskan kebutuhan dan material selama masa transisi yang didalam tersebut mencakup kebutuhan pangan, namun ini tidak mencakup tindakan khusus untuk mengatasi krisis pangan di Yaman. melihat data dari OCHA dan WFP dari tahun 2009-2013 meningkat sekitar 10% jumlah masyarakat rawan bertambah

sehingga kebijakan yang dibuat belum efektif untuk mengatasi krisis pangan. Kegagalan kebijakan NFSS dan TPSD disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah Yaman untuk mengambil tindakan darurat dalam merespon krisis pangan.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa pemerintah Yaman tidak serius dalam mengatasi krisis pangan karena ketiadaan sinkronisasi antara pemerintah Yaman dan Houthi yang di mana kedua aktor tersebut mempengaruhi krisis pangan di Yaman. Kondisi ini menjadi bukti bahwa, kebijakan luar negeri pemerintah Yaman gagal dalam mengatasi krisis pangan dengan. Hal ini terbukti dengan data yang sudah dikumpulkan bahwa dengan ketidakmampuan pemerintah Yaman dalam menentukan *Decision-Making* dalam keadaan darurat di kebijakan NFSS di tahun 2011 dan program TPSD pada tahun 2012. Pada tahun berikutnya, pemerintah Yaman meminta bantuan kepada salah satu organisasi internasional dalam hal bantuan pangan yaitu *World Food Programme*.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa kebijakan luar negeri pemerintah Yaman gagal dalam mengatasi krisis pangan pada Arab Spring pada tahun 2011-2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor yang menyebabkan kegagalan kebijakan luar negeri Yaman dalam mengatasi krisis pangan.
2. Mengetahui hambatan pemerintah Yaman dalam mengatasi krisis pangan

3. Mengetahui kondisi pangan Yaman .
4. Mengetahui kebijakan dan program untuk mengatasi krisis pangan di Yaman

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan menganalisis kepada kegagalan kebijakan luar negeri Yaman dalam kurun 2011-2014. Dalam kurun waktu tersebut di negara Yaman mengalami fenomena Arab Spring yang di mana fenomena ini menjadi titik Yaman mengalami krisis pangan dan eskalasi konflik. Dalam upaya untuk mengatasi krsisi pangan pemerintah Yaman membuat kebijakan luar negeri dan program terdiri dari *National Food Security System* (NFSS) dibuat pada tahun 2011 dan *Transitional Program for Stabilization Development* (TPSD) dibuat pada tahun 2012. Kegagalan tersebut akan diperkuat dengan teori Coplin yang dimana terdapat 3 elemen yang mempengaruhi suatu kebijakan luar negeri yaitu politik domestik, ekonomi dan militer, dan konteks internasional. Hal ini dilakukan dengan alasan politik domestik di Yaman yang tidak kondusif di mana pasukan Houthi mengambil kota Sana'a dan pemerintah Yaman berada di kota Aden. Perang sipil yang terjadi di Yaman membuat ketiadaan sinkronisasi dalam mengatasi krisis pangan di Yaman sehingga pemerintah Yaman dan organisasi internasional mengalami hambatan dalam menyalurkan bantuan ke daerah yang terkena konflik.

1.5 Tinjauan Pustaka

Menurut Adeb Abdulelah Abdulwahid Al-Tamimi dalam jurnalnya yang berjudul *Arab Spring in Yemen : Cause and Consequences* Peristiwa Arab Spring di Yaman disebabkan oleh kondisi politik dan sosial-ekonomi. Alasan politik

dimulai dari Keinginan rezim untuk membuat konstitusional amandemen. Pernyataan beberapa pejabat negara yang setia kepada rezim memicu niat yang jelas dari Saleh untuk membuat amandemen konstitusi yang akan memungkinkan menjabat sampai anaknya yang akan menggantikan posisi dirinya. Sehingga memicu gerakan Arab Spring ini. Penggunaan kekerasan untuk penertiban juga menambahkan kerusuhan yang terjadi hal ini melanggar hak asasi manusia, tidak adanya kebebasan berekspresi, kontrol penuh atas media, dan kekerasan terus-menerus terhadap jurnalis dan aktivis hak asasi manusia adalah faktor utama di balik revolusi Musim Semi Arab yang terjadi pada tahun 2011. Masalah sosial dan ekonomi menyebabkan dampak yang sangat signifikan bagi negara Yaman.

Dampak yang disebabkan dari konflik Arab Spring seperti pengangguran, kemiskinan, ekonomi yang memburuk, kesehatan, hingga pendidikan. Terdapat sekitar 40% dari populasi negara yang terdiri dari 23 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Sumber-sumber PBB menunjukkan bahwa, tingkat pengangguran di Yaman mencapai 31,5% dari populasi yang tidak memiliki ketahanan pangan. Bahkan, sebesar 12% dari populasi tersebut mengalami kekurangan pangan. Sehingga, konflik Arab Spring merupakan salah satu penyebab semakin memburuknya kondisi pangan di Yaman. Dengan kondisi seperti itu mengakibatkan krisis pangan di Yaman karena ketidakjelasan pemerintah dalam mengatur ekonomi dan makanan negara membuat rakyat Yaman menjadi sengsara (Altamimi dan Venkatesha 2020).

Menurut Wayan Yulia Swadewi, dalam jurnalnya berjudul Hambatan Pemerintah Yaman dalam Mengelola Bantuan Pangan dari World Food Programme

tahun 2011-2016. Karena di Yaman mengalami krisis pangan maka organisasi internasional yaitu *World Food Programme* berniat membantu Yaman. Namun, ada hambatan distribusi makanan yang diberikan. Adapun yang pertama adalah letak geografis Yaman yang tidak mendukung untuk menanam pertanian karena minimnya lahan dan kesuburan tanah tidak bagus. Dampaknya Yaman sangat bergantung kepada impor pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kondisi iklim di Yaman juga mempengaruhi krisis pangan karena curah hujan di sana sangat rendah. Kedua ketidakstabilan politik di yaman mengakibatkan penurunan produksi dalam negeri, terganggunya impor untuk kemanusiaan dan impor komersial, kenaikan harga pangan dan bahan bakar, pengangguran yang merajalela kehilangan pendapatan, tingkat pendanaan yang relatif rendah untuk badan-badan PBB yang memberikan bantuan pangan dan jatuhnya layanan publik serta jaring pengaman sosial. Faktor tersebut berdampak ke situasi krisis pangan sehingga membuat rakyat Yaman sengsara. Kemudian Pemerintah Yaman membuat kebijakan *National Food Security System* pada tahun 2011 namun gagal. Pada tahun 2012-2014 pemerintah Yaman membuat kebijakan lagi yaitu *Transitional Program for Stabilization and Development* (TPSD) dan juga berakhir gagal. Bisa dikatakan Pemerintah Yaman memiliki *decision-making* yang buruk dalam menentukan kebijakan. Setelah gagal kedua kebijakan itu, *World Food Programme* membantu Yaman dalam mengatur krisis pangan dengan program *Emergency Operation*. Namun dalam pelaksanaannya terkendala oleh Infrastruktur hancur, akses jalan yang buruk, dan ada hambatan di pos perjalanan membuat menambah permasalahan krisis pangan di Yaman. Dengan demikian penyaluran distribusi bantuan dari WFP tersebut menjadi terhambat (Sadewi, Dewi dan Suwecawangsa 2018).

Menurut Ahmad Niaz dalam jurnalnya berjudul *Yemeni Civil War : Causes, Consequences and Prospect* menjelaskan ada dua penyebab perang saudara Yaman yang berdampak buruk kepada warganya yang berakibat kepada warga Yaman sehingga mengalami krisis kemanusiaan. Banyak dampak yang dialami oleh warga Yaman seperti, susahny mendapatkan makanan dan ekonomi menurun. Pertama adalah pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Houthi. Kelompok Houthi diperlakukan berbeda dari mana semestinya. Akhirnya mereka bersatu untuk memperebutkan pemerintah Yaman. Kedua, pemerintah Yaman sendiri membuat kebijakan yang merugikan negaranya sendiri. Hal ini diprotes oleh kelompok Houthi yang di mana ketika presiden Abdu Mansour Hadi mencabut subsidi bahan bakar. Terakhir, pecahnya militer di Yaman Abdu Rabbu Mansour Hadi seorang presiden yaman yang memimpin pemerintah sah dan didukung oleh Arab Saudi, Pasukan Houthi dipimpin Zaidi Syiah bersekutu dengan mantan presiden Ali Abdullah saleh dan didukung oleh Iran. Akibat gagalnya transisi politik dan gagal membawa perdamaian, akhirnya Yaman menghadapi perang saudara yang berdampak ke krisis kemanusiaan. Keadaan di Yaman sangat mencekam di mana sekitar 7.3 juta orang butuh makanan segera sehingga mengalami kelaparan. Mereka kekurangan obat-obatan dan anak-anak di Yaman mengalami kekurangan gizi (Niaz 2019).

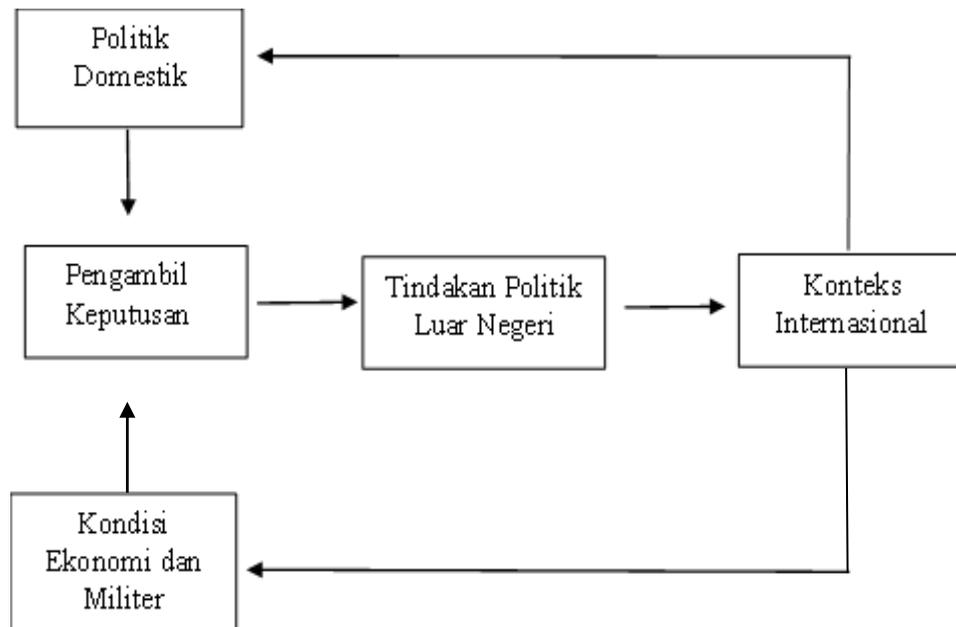
Dari pemaparan literatur di atas, telah banyak penelitian yang membahas permasalahan krisis pangan di Yaman. Permasalahan ini dibahas melalui pandangan-pandangan politik, sosial, dan ekonomi. Namun, dari pemelitian sebelumnya belum membahas kegagalan kebijakan luar negeri yaman dalam mengatasi krisis pangan secara spesifik. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan

penelitian ini adalah penelitian ini akan berfokus kepada kegagalan kebijakan pemerintah Yaman dalam mengatasi krisis pangan. Sementara penelitian terdahulu berfokus kepada peran organisasi internasional dalam mengatasi krisis pangan di Yaman. Dengan menggunakan teori dari William D Coplin ini akan menganalisis, mengidentifikasi serta menyempurkan kekurangan dari penelitian sebelumnya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan kerangka teori *foreign policy* dari William D. Coplin. Teori ini diperkenalkan dalam bukunya yang berjudul “Introduction to International Politic : *Model of Decision Making Process*” (Coplin dan Marbun 2003). Kerangka teori ini merupakan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap kegagalan kebijakan pemerintah Yaman dalam mengatasi krisis pangan yang berlangsung pada 2011-2014. Teori Coplin memberikan tiga faktor yang mempengaruhi kepentingan kebijakan luar negeri di suatu negara yaitu melalui situasi politik domestik , kondisi ekonomi dan militer, dan konteks internasional.

Gambar 1 Peta Teori Decision Making



Sumber : (Coplin and Marbun 2003)

Menurut Coplin, ketiga faktor di atas saling berkaitan satu dengan lainnya. Coplin juga menjelaskan bahwa ketiga faktor tersebut mampu mempengaruhi pengambil kebijakan dalam mencapai kepentingan mereka.

Pertama, situasi politik domestik menjelaskan tentang aktor yang terkait dalam mengambil keputusan kebijakan. Terdapat 4 aktor yang mempengaruhi pengambil kebijakan yaitu birokrat yang mempengaruhi yang berisi organisasi pemerintahan; partai yang mempengaruhi yang berisi partai dalam suatu negara; kepentingan yang mempengaruhi yang terdiri atas orang yang bergabung dalam suatu kepentingan bersama; dan terakhir massa yang mempengaruhi adalah opini publik yang dapat mempengaruhi pembuat kebijakan. kemudian kapasitas ekonomi dan militer, hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Dalam kapasitas ekonomi ini, terdapat bagaimana suatu negara dijadikan kriteria untuk menaksir kekuatan dan kelemahan ekonominya. Yang pertama produksi barang dan

jasa dalam negeri dan kedua ketergantungan pada perdagangan dan finansial internasional. Pada kapasitas militer, dalam mengukur kekuatan militer terdapat tiga yaitu jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan perlengkapan militer. Kebergantungan pada sumber-sumber luar negeri seperti dukungan logistik. Kemudian, Terakhir konteks internasional menekankan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan akan berdasarkan hubungan dengan negara lain atau sistem internasional. Suatu negara harus memiliki sistem pertahanan untuk menciptakan kemampuan yang dibutuhkan untuk menopang politik luar negerinya.

Pada variabel situasi politik domestik, penulis menekankan bahwa situasi politik domestik di Yaman menjadi faktor pendorong besar perubahan kebijakan dalam mengatasi krisis pangan sejak terjadinya Arab spring. Pasukan Houthi memiliki dampak yang signifikan terhadap Yaman. Pasukan Houthi memiliki tujuan utama adalah untuk mengatasi keluhan komunitas Zaidi Yaman, yang mereka anggap terpinggirkan dan didiskriminasi oleh pemerintah Yaman. Konflik antara pasukan Houthi dan pemerintah Yaman memberi dampak ke kondisi pangan internal Yaman. Hal ini membuat masyarakat susah dalam mengakses makanan karena terjadinya konflik tersebut. konflik Arab Spring merupakan salah satu penyebab semakin memburuknya kondisi pangan di Yaman. Dengan kondisi seperti itu mengakibatkan krisis pangan di Yaman karena ketidakjelasan pemerintah dalam mengatur ekonomi dan makanan negara membuat rakyat Yaman menjadi sengsara.

Pada variabel kapasitas ekonomi dalam memenuhi ekonomi negara, Yaman mengimpor hampir 85% minyak bumi. Pendapatan sektor minyak menyumbang sebagian besar pendapatan negara, fasilitas produksi minyak tidak pernah

dikembangkan untuk memenuhi persyaratan produksi yang efisien. Produksi minyak terus menurun dengan diserangnya kilang minyak sehingga terganggu produksi. Pada kapasitas militer yaman harus menghadapi ketidakstabilan internal militer. Pasukan militer Yaman dibagi dua, yang pertama adalah pro terhadap presiden Mansour Hadi dan yang kedua adalah pro terhadap presiden Ali Abdullah Saleh. Dalam kemampuan militer menurut laporan Global Firepower 2014, Yaman menempati posisi ke 44 yang di mana masih kalah jauh dari negara tetangganya yaitu Arab Saudi.

Pada variabel konteks internasional, penulis menganalisis bahwa Yaman sangat bergantung kepada WFP. Akibat dari eskalasi konflik terus terjadi dan ketidakmampuan pemerintah Yaman dalam mengatasi krisis pangan, pemerintah Yaman akhirnya meminta bantuan kepada organisasi internasional untuk mengakhiri krisis pangan tersebut. Dalam mengatasi krisis pangan tersebut, WFP membuat program yang menargetkan 6,8 juta orang dalam situasi krisis pangan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan bagi WFP untuk menyalurkan bantuan kepada Yaman. Sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengiriman bantuan WFP. Kemudian, fenomena Arab spring juga mempengaruhi Yaman. Dengan diawali di Tunisia dan beranjak ke Yaman untuk melakukan revolusi. Ketiga faktor tersebut menjadi landasan untuk menyusun argumen yang kuat terhadap kegagalan kebijakan pemerintah Yaman dalam mengatasi krisis pangan pasca Arab spring dalam kurun waktu 2011-2014.

1.7 Argumen Sementara

Kebijakan luar negeri pemerintah Yaman gagal dalam mengatasi krisis pangan pada Arab *Spring* 2011-2014 karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut didasari oleh teori *decision making* oleh William D. Coplin. Secara hipotesis, Ketiga faktor tersebut mempengaruhi kegagalan kebijakan pemerintah Yaman dalam mengatasi krisis pangan. Suatu negara harus memiliki sistem pertahanan untuk menciptakan kemampuan yang dibutuhkan untuk menopang politik luar negerinya. Akibat dari konflik internal yang terjadi di Yaman, kebijakan yang dibuat yaitu NFSS pada tahun 2011 dan TPSD pada tahun 2012 mengalami kegagalan. Situasi politik domestik kacau, eskalasi konflik yang terus terjadi membuat situasi ekonomi dan militer kacau. Ketidakmampuan pemerintah Yaman dalam mengatasi krisis pangan pemerintah Yaman kemudian bergantung kepada *World Food Programme*.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Secara keseluruhan penelitian ini diawali dengan pembentukan tata kata dan bahasa, kemudian merajut ke konteks. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai gambaran sepenuhnya tentang apa yang diteliti.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pemerintah Yaman yang di mana menjadi pusat penelitian skripsi ini di mana Yaman mengalami krisis pangan. Sedangkan, objek penelitian ini adalah kebijakan Yaman dalam mengatasi krisis pangan.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui pengumpulan artikel dan jurnal tentang tema yang dibahas. Penelitian ini diharuskan mendapat data yang jelas, spesifik dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi.

1.8.4 Proses Pengumpulan Data

Pada penelitian ini proses pengumpulan data yang dilakukan memiliki tahapan, seperti mencari data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, menjabarkan latar belakang masalah. Selanjutnya menentukan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas beberapa bab yaitu :

- Bab pertama akan memaparkan pemahaman dasar dari penelitian yang dilakukan. Latar Belakang Yaman mengalami krisis pangan akibat kegagalan pemerintah dalam mengatasinya. Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Cakupan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Argumen Sementara dan metode penelitian.

- Bab kedua akan memaparkan kondisi pangan di Yaman dan kebijakan dari pemerintah Yaman yaitu *National Food Security System* (NFSS) dan *Transitional Program for Stabilization and Development* (TPSD).
- Bab ketiga akan memaparkan pengaplikasian teori Coplin kegagalan kebijakan luar negeri Yaman gagal dalam mengatasi krisis pangan di Yaman .
- Bab keempat akan memaparkan kesimpulan dari hasil dari penelitian faktor penyebab kegagalan pemerintah Yaman dalam mengatasi krisis pangan pada Arab Spring 2011-2014.

BAB II

KONTEKS PANGAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH YAMAN TERHADAP KRISIS PANGAN

Krisis pangan adalah situasi kelangkaan pangan yang dialami oleh sebagian besar Masyarakat di suatu daerah yang disebabkan oleh kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam, dan konflik perang. Krisis pangan identik dengan menipisnya persediaan makanan. Krisis pangan yang terjadi di Yaman saat ini dipicu oleh konflik *Arab Spring* pada tahun 2011. Meningkatnya eskalasi konflik di Yaman diakibatkan oleh oposisi di Yaman yaitu gerakan Houthi yang didukung oleh presiden Ali Abdullah Saleh. Walaupun demikian, krisis yang terjadi di Yaman khususnya di bidang pangan sudah terjadi sebelum Arab Spring yaitu pada krisis pangan dunia tahun 2008.

Bab 2 dalam tulisan ini membahas tentang kondisi pangan Yaman dan kebijakan pemerintah Yaman terhadap krisis pangan. Bab ini sangat diperlukan dalam penelitian ini guna menjadi dasar dalam analisis kebijakan pemerintah Yaman dinilai gagal dalam mengatasi krisis pangan. Bab ini secara spesifik membahas kebijakan pemerintah Yaman dalam mengatasi krisis pangan pada tahun 2011 hingga 2014.

2.1. Kondisi Pangan di Yaman

Konflik di Yaman telah membuat kondisi negara ini menjadi kelaparan. Saat ini, lebih dari setengah populasi di Yaman mengalami kelaparan. Kerawanan pangan paling parah terjadi di daerah yang terkena konflik langsung dan khususnya kelompok yang terkesampingkan, komunitas nelayan dan para

buruh. Kerawanan pangan dan malnutrisi saat ini merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Yaman. Dalam laporan *Food Security Monitoring Survey* pada tahun 2013, Dari total 25,26 juta orang, sekitar 4,5 juta rawan pangan parah dan lebih dari 6 juta rawan pangan sedang (WFP 2013). Tingkat malnutrisi baik kronis maupun akut juga sangat tinggi. Sekitar setengah dari anak-anak Yaman mengalami kekurangan gizi kronis dan satu dari sepuluh anak tidak dapat hidup hingga mencapai usia lima tahun. Setiap tahun jutaan orang yaman mengalami kelaparan dan lebih rentan sakit, sehingga Yaman membutuhkan bantuan lebih. Bantuan kemanusiaan menjadi pilihan untuk bertahan hidup.

2.1.1 Krisis Pangan di Yaman

Krisis pangan di Yaman telah terjadi bahkan sebelum peristiwa Arab Spring. Setelah terjadinya Arab Spring, konflik ini banyak merenggut kehidupan masyarakat salah satunya adalah kekurangan pangan. Menurut data dari WFP lebih dari 15 juta penduduk mengalami krisis pangan dan air. Negara Yaman sangat bergantung kepada impor makanan karena di Yaman geologinya tidak mendukung untuk pertanian. Dan di daerah lokal juga terjadi kenaikan harga pokok makanan yang membuat masyarakat susah untuk membeli. Pada saat yang sama, pengurangan produksi pertanian dan pembatasan akses ke pasar tenaga kerja Saudi telah mengurangi uang yang masuk ke banyak keluarga Yaman. Konflik ini telah membuat impor makanan terganggu oleh blokade yang terjadi di pelabuhan laut dan udara dan pembatasan administratif yang diberlakukan oleh semua pihak yang berkonflik yaitu Houthi dan Pemerintah Yaman itu sendiri. Setiap tahun selalu terjadi kenaikan orang yang kelaparan dan membutuhkan makanan.

Menurut data dari *Yemen : Food Security & Nutrition* di tahun 2009-2013 Kerawanan pangan di Yaman sebagian besar tetap tidak berubah tahun ini, dengan 43 persen makanan penduduk tidak aman (lebih dari 10 juta orang) dibandingkan dengan 44 persen pada tahun 2012. Namun jumlah orang yang tidak aman telah berkurang dari 5,2 juta pada tahun 2012 menjadi 4,5 juta tahun ini. Dibandingkan tahun 2009 ketika 31,5 persen dari populasi Yaman (6,8 juta orang) tidak aman pangan, situasi keseluruhan telah memburuk (OCHA, WFP 2013).

Tabel 2 Tabel Penduduk Rawan Pangan di Yaman

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK RAWAN PANGAN
2009	6.800.000
2010	7.200.000
2011	10.500.000
2012	10.500.000
2013	>10.500.000
2014	>10.600.000

Sumber : (WFP 2014)

2.1.2 Harga Pangan di Yaman

Harga pangan tinggi dan utang yang tinggi menjadi sebagai dua ancaman utama yang memperparah kondisi ketahanan pangan bagi jutaan orang di Yaman di hampir seluruh wilayah. Rumah tangga yang kekurangan makanan terpaksa mengurangi lagi porsi makanan mereka karena menggunakan berbagai strategi bertujuan untuk mengonsumsi makanan yang kurang disukai dan lebih murah,

membatasi ukuran makanan, mengurangi jumlah makanan, dan membatasi konsumsi orang dewasa demi anak-anak. Menurut FEWSNET, per April 2011, harga pangan meningkat secara signifikan karena tingkat ketidakamanan yang tinggi. Apalagi, karena Yaman sangat bergantung pada impor gandum, lokal harga gandum yang melihat harga di pasar internasional (FAO 2012). Pasokan pangan pokok tetap normal di sebagian besar wilayah negara selama 2013 hingga 2014 . Namun, arus komoditas pangan terganggu di beberapa daerah seperti Hajja, Sa'ada dan Hodieda, akibat konflik lokal dan terbatasnya akses pasar perbatasan dengan Arab Saudi yang berdampak pada pergerakan pedagang dan arus/pasokan komoditas membuat akses makanan menjadi terhambat (WFP 2014).

2.2 Upaya Pemerintah Yaman

Dalam mengatasi krisis pangan, Pemerintah Yaman sudah berupaya untuk mencari jalan keluar permasalahan krisis ini. Pemerintah Yaman akhirnya mengeluarkan kebijakan *National Food Security System* (NFSS) yang berisi 7 poin rencana aksi yang diharapkan untuk mengatasi krisis pangan dan mencapai ketahanan pangan di Yaman. Pemerintah berharap dengan kebijakan dapat mengatasi krisis pangan dalam kurun waktu 5 tahun setelah kebijakan NFSS dibuat. Namun pada akhirnya kebijakan ini harus berhenti karena terjadi permasalahan di Yaman Setelah kebijakan NFSS gagal, Pemerintah Yaman mengeluarkan kebijakan terbaru yaitu *Transitional Program for Stabilization and Development* (TPSD). Kebijakan berfokus untuk menstabilkan politik dan ekonomi, memenuhi kebutuhan manusia. Walaupun kebijakan memfokuskan ke memenuhi kebutuhan warga Yaman, kebijakan ini tidak memiliki tindakan khusus untuk mengatasi permasalahan krisis pangan.

2.2.1 Kebijakan National Food Security System (NFSS)

Dalam menjalankan kebijakan ini NFSS memiliki tujuan yaitu mengamankan ketahanan pangan di Yaman 2015-2020. Yaman memiliki visi untuk memiliki akses makanan yang cukup dan bergizi setiap hari untuk hidup sehat dan semua orang dapat ketahanan pangan. Untuk mencapai misi kebijakan agar berhasil semua stakeholder harus memiliki integritas, memastikan agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian, memastikan bahwa program-program yang sudah disusun mendapat informasi yang baik agar semua stakeholder bersinkronisasi dengan baik. Memastikan bahwa pendanaan bersifat fleksibel, dapat diprediksi, tidak memihak, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Sesuai dengan komitmen terhadap Donor Kemanusiaan yang Baik, para pendonor harus menyediakan pendanaan yang fleksibel dan bersedia untuk mentransfer anggaran antara aliran pembangunan dan kemanusiaan, sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Para donatur dari luar Yaman harus mempertimbangkan untuk mencairkan bantuan mereka atau menyalurkan kembali dukungan mereka ke dalam program kemanusiaan. Mereka tidak boleh berpaling dari Yaman pada saat dibutuhkan. Para pendonor juga harus memastikan bahwa strategi dan program bantuan mereka didorong oleh keprihatinan kemanusiaan dan tidak dimotivasi atau dibuat tergantung pada perubahan rezim atau tujuan keamanan (Oxfam 2011).

National Food Security System telah melakukan perencanaan lebih lanjut dan penetapan biaya strategi. Memprioritaskan sektor-sektor yang sedang kritis melalui konsultasi dengan masyarakat sipil, donor, dan lembaga kemanusiaan. Secara khusus, reformasi sektor air, pembentukan cadangan pangan strategis, dan kebutuhan khusus perempuan sebagai konsumen dan produsen harus ditangani

dengan lebih baik. Kebijakan NFSS memiliki 7 Fokus utama untuk mengamankan ketahanan pangan di Yaman.yaitu Reformasi minyak bersubsidi, Memperbarui lingkungan bisnis, Mengurangi produksi dan konsumsi qat, Meningkatkan manajemen risiko di bidang ketahanan pangan,. Menerapkan strategi sektor air minum, Meningkatkan investasi publik dan penyediaan layanan Kampanye gerakan kesadaran.

Jika rencana Aksi 7-Poin ini diimplementasikan, Yaman dapat mencapai sasaran ketahanan pangan masing-masing pada tahun 2015 dan 2020. Mengingat sifat komprehensif NFSS, Strategi ini dapat menjadi “ibu dari semua strategi” dan memberikan kontribusi penting bagi kebijakan pembangunan Yaman selama dekade berikutnya. Namun, penting bagi pembuat kebijakan sekarang untuk segera beralih dari menyatakan tujuan dan menentukan tindakan untuk membuat reformasi kebijakan yang diperlukan dan merancang rencana dan program investasi khusus untuk mengimplementasikan Rencana Aksi 7-Poin. Selain itu, implementasi kebijakan, investasi, dan program yang diusulkan dalam Strategi ini kemungkinan akan paling efektif bila dilakukan secara transparan dan inklusif dengan tindak lanjut yang efektif, proses pengambilan keputusan berbasis bukti, dan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang tepat. Ini akan membutuhkan rancangan kelembagaan yang sesuai dan upaya yang signifikan untuk memperkuat kapasitas di semua kementerian yang terlibat (Septiani 2020). Yang paling penting, implementasi yang berhasil akan menuntut kepemimpinan yang tegas dan komitmen dari semua kementerian utama untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi ketahanan pangan Yaman.

2.2.2 Program Transitional Program for Stabilization and Development (TPSD)

Pada tahun 2012 pemerintah Yaman membuat program kembali setelah NFSS dihentikan. Kebijakan ini bernama *Transitional Program for Stabilization and Development* (TPSD). Kebijakan ini berfokus kepada empat prioritas, pertama menyelesaikan pengalihan kekuasaan secara damai dan memulihkan stabilitas politik; kedua mencapai stabilitas keamanan dan meningkatkan aturan hukum; ketiga memenuhi kebutuhan kemanusiaan dan material yang mendesak; dan keempat mencapai stabilitas makroekonomi (UNDP 2013).

Kemerosotan di bidang politik dan keamanan sejak awal tahun 2011 menyebabkan kehancuran pada indikator ekonomi, keuangan dan moneter serta kemerosotan mata pencaharian dan situasi kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga terjadi kekacauan yang dahsyat di Yaman. Masalah pengangguran dianggap sebagai tantangan terpenting yang dihadapi dalam proses pembangunan di Yaman. Hal ini berkontribusi dapat merusak stabilitas politik dan keamanan di negara ini terutama karena sangat terkonsentrasi di kalangan pemuda sebesar 52,9% (kelompok usia 15-24 tahun). Persentasenya juga mencapai 44,4% pada kategori umur (25-59 tahun). Pengangguran tersebar luas bahkan di kalangan orang-orang berpendidikan. Sekitar 25% dari orang yang menganggur adalah lulusan dari sekolah menengah ke atas. Untuk mengurangi pengangguran, sangat penting untuk mempercepat rekonstruksi infrastruktur yang rusak dan menghidupkan kembali sektor-sektor produktif sehingga dapat membangun kembali ekonomi (UNDP 2013).

Perkiraan menunjukkan bahwa jumlah mereka yang terkena dampak memburuknya situasi kemanusiaan meningkat menjadi sekitar 8 juta orang selama

tahun 2011. Jika digunakan indikator kerawanan pangan dan malnutrisi, jumlah ini bisa lebih dari 10 juta orang. Penderitaan orang-orang yang tinggal di daerah yang menyaksikan konflik bersenjata telah diperparah terutama di Al-Hassabah, Sufan, Bani Al-Hareth di Ibu Kota, distrik Arhab dan Nihm di gubernuran Sana'a dan kota Taiz selain perang melawan Al Qaeda di Kegubernuran Abyan. Ini di samping Sa'ada, Amran, dan Hajjah (OCHA 2011).

TPSD telah dikembangkan dengan tujuan menyeluruh “Memulihkan stabilitas politik, keamanan dan ekonomi serta meningkatkan pembangunan negara”. Itu dibangun di sekitar dua pilar utama yang mencakup 5 area fokus untuk ditangani selama transisi dan seterusnya seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini. TPSD memandang isu pemberdayaan pemuda dan perempuan sebagai lintas sektor sekaligus berdiri sendiri di wilayah tertentu sebagaimana akan diuraikan lebih rinci dalam masing-masing bagian berikut. Selain itu, di masing-masing bidang akan disajikan seperangkat langkah langkah reformasi yang memiliki potensi manfaat besar bagi keseluruhan program dan keberhasilan masa transisi (UNDP 2013).

- a. Menyelesaikan pemindahan kekuasaan secara damai dan memulihkan stabilitas politik

Melakukan dialog nasional inklusif untuk semua kekuatan dan kelompok politik termasuk pemuda dan perempuan. Dialog nasional akan menghasilkan solusi nasional yang akan menjaga persatuan, keamanan dan stabilitas Yaman. Kemudian, membentuk Sebuah komite untuk persiapan konferensi dan sebuah komite untuk interpretasi harus dibentuk selain mengadakan konferensi dialog nasional itu sendiri dan belajar dari pengalaman negara-negara lain.

Memperkenalkan reformasi konstitusional untuk memperbaiki struktur negara dan sistem politiknya. Majelis konstituante untuk menyusun konstitusi baru akan dibentuk dan referendum tentang konstitusi baru akan dilakukan (UNDP 2013)

Membangun sistem pemilu yang tepat. Ini termasuk pengembangan undang-undang pemilu, pembentukan Komisi Tinggi untuk Pemilihan dan Referendum, dan berdasarkan konsensus pembuatan daftar pemilih baru atau pemutakhiran daftar pemilih yang sudah ada. Selain itu, pemilihan parlemen dan presiden akan dilakukan.

b. Mencapai stabilitas keamanan dan meningkatkan supremasi hukum

Dengan kondisi penuh konflik tentunya banyak terjadi kriminalitas di lingkungan Yaman sehingga pemerintah harus ada kebijakan yang menghentikan segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis seksual dan gender, dan pelanggaran hukum humaniter internasional. Implementasi kebijakan TPSD untuk mengakhiri semua konflik bersenjata agar memastikan perlindungan hak asasi manusia dan mengkriminalkan setiap pelanggaran. Mengintegrasikan angkatan bersenjata di bawah kesatuan komando profesional dan nasional (UNDP 2013).

c. Memenuhi kebutuhan kemanusiaan dan material yang mendesak

Pemerintah Yaman harus menjamin kebutuhan dasar dan sosial warga negara dalam hal barang dan jasa (termasuk makanan). Memastikan pasokan produk minyak bumi dan gas memasak yang cukup agar tidak terjadi krisis minyak di Yaman sehingga roda kehidupan di Yaman terus berjalan. Memenuhi kebutuhan lokal akan listrik dan air secara teratur dan tanpa gangguan. Memberikan bantuan kemanusiaan dan kompensasi kepada keluarga para martir dan mengobati orang

yang terluka, dalam hal ini *World Humanitarian Forum* (WHF) di ikut serta dalam membantu kemanusiaan (UNDP 2013).

d. Mencapai stabilitas ekonomi

Runtuhnya ekonomi Yaman, dikombinasikan dengan dampak perang dan populasi yang berkembang pesat. Pemerintah yaman harus mengaktifkan institusi ekonomi pusat yang vital, seperti Bank Sentral Yaman atau Kementerian Keuangan, untuk berfungsi secara efektif dan koheren, merupakan prasyarat untuk pemulihan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro. Melibatkan lembaga-lembaga ini dalam latihan peningkatan kapasitas yang ditargetkan sangat penting untuk membangun kembali ekonomi yang layak dan tangguh. Pemerintah yaman harus mengontrol defisit anggaran publik dan membiayainya dari sumber non-inflasi melalui langkah-langkah seperti dukungan anggaran langsung untuk menutupi biaya tambahan jaminan sosial, penghematan dari subsidi produk minyak bumi (UNDP 2013).

BAB III

ANALISIS

Bab 3 dalam tulisan ini membahas Faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan kebijakan pemerintah yaman dalam mengatasi krisis pangan. William D Coplin menekankan tiga faktor utama untuk menilai kebijakan luar negeri di suatu negara yaitu situasi politik domestik, kapasitas ekonomi dan militer, dan konteks internasional. Dalam studi kasus di Yaman, penulis menggunakan ketiga faktor tersebut dan akan diperkuat dengan komponen yang berpengaruh secara besar besar dalam politik di Yaman. Pada situasi politik domestik menekankan terhadap pergerakan pasukan Houthi, pasukan Houthi ini sangat berpengaruh di Yaman. Pada kapasitas ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yaman mengimpor hampir 85% minyak bumi. Pendapatan sektor minyak menyumbang sebagian besar pendapatan negara. Pada kapasitas militer, Yaman harus menghadapi ketidakstabilan internal militer, mereka harus berperang melawan pasukan Houthi. Dan terakhir konteks internasional, Yaman sangat bergantung kepada bantuan kemanusiaan WFP akibat dari konflik tersebut. Kemudian, fenomena Arab spring juga mempengaruhi Yaman. Dengan diawali di Tunisia dan beranjak ke Yaman untuk melakukan revolusi

3.1. Politik Domestik

3.1.1 Kepentingan Houthi

Houthi, juga dikenal sebagai Ansar Allah, adalah kelompok politik dan militer Islam Syiah Zaidi yang berbasis di Yaman. Gerakan ini muncul pada 1990-an dan menjadi terkenal selama revolusi Yaman pada 2011, yang menyebabkan

penggulingan presiden lama Yaman, Ali Abdullah Saleh. Houthi berasal dari komunitas Syiah Zaidi, yang merupakan cabang dari Islam Syiah yang banyak ditemukan di Yaman. Mereka memiliki kubu mereka di bagian utara Yaman, khususnya di wilayah Saada. Kelompok tersebut dipimpin oleh Abdul-Malik al-Houthi, yang merupakan saudara dari pendirinya, Hussein Badreddin al-Houthi (Wilson Center 2022).

Kebangkitan gerakan Houthi ke tampuk kekuasaan dapat dikaitkan dengan kombinasi faktor, termasuk keluhan komunitas Zaidi, ketidakstabilan politik di Yaman, dan persaingan sumber daya dan kekuasaan di antara berbagai faksi. Mereka memanfaatkan ketidakpuasan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, khususnya di wilayah utara Yaman, dan berhasil menggalang dukungan. Pengaruh gerakan Houthi melampaui kendali militer. Mereka telah membentuk pemerintahan de facto di wilayah yang mereka kuasai dan menerapkan sistem administrasi dan peradilan mereka sendiri. Mereka juga mampu membentuk lanskap politik di Yaman dengan membentuk aliansi dengan faksi politik lain dan menegosiasikan perjanjian pembagian kekuasaan. Pengaruh gerakan Houthi memiliki implikasi regional dan internasional yang signifikan. Konflik di Yaman, yang sebagian besar mengacu kepada pasukan Houthi dengan koalisi pimpinan Saudi yang mendukung pemerintah yang diakui secara internasional, telah meningkat menjadi krisis kemanusiaan terburuk. Konflik tersebut juga menjadi perang proksi antara kekuatan regional, dengan Iran dituduh mendukung Houthi dan Arab Saudi memimpin koalisi yang menentang mereka. Kontrol gerakan Houthi atas area-area utama, termasuk Sana'a dan kota pelabuhan strategis Hodeidah, telah memberi mereka

pengaruh dalam konflik dan memungkinkan mereka untuk mengganggu rute pelayaran internasional di Laut Merah (Amin 2015).

Tujuan utama Houthi adalah untuk mengatasi keluhan komunitas Zaidi Yaman, yang mereka anggap terpinggirkan dan didiskriminasi oleh pemerintah Yaman. Mereka mengadvokasi reformasi politik dan sosial, perwakilan yang lebih besar untuk Zaidi, dan desentralisasi kekuasaan di Yaman. Perang di Yaman telah mengakibatkan krisis kemanusiaan yang parah, dengan ribuan korban sipil, kelaparan yang meluas, dan kurangnya akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan perawatan kesehatan (Alasrar 2022). Konflik tersebut juga menarik perhatian internasional dan ditandai dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat. Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan melalui jalur diplomatik dan pembicaraan damai, namun penyelesaian yang langgeng belum tercapai. Situasi tetap sangat kompleks dan bergejolak, dengan berbagai aktor regional dan internasional terlibat dalam konflik tersebut.

Status oposisi gerakan Houthi adalah masalah yang kompleks. Dari sudut pandang mereka, mereka menilai diri mereka sebagai gerakan perlawanan yang sah melawan pemerintah yang buruk dan melakukan agresi dalam upaya menata kembali struktur negara mereka. Mereka menilai pemerintah Yaman telah melakukan korupsi, diskriminasi, dan marginalisasi, khususnya terhadap pengikut Syiah Zaidi. Mereka juga mengklaim bahwa mereka juga melawan campur tangan asing, terutama dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang selama ini mendukung pemerintah Yaman secara militer (Wilson Center 2022).

Namun, dari perspektif internasional, gerakan Houthi sering dipandang sebagai kelompok pemberontak bersenjata yang memulai pengambilalihan pemerintah Yaman dengan kekerasan. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara menganggap pemerintah Yaman yang dipimpin oleh Presiden Abdurabbuh Mansur Hadi sebagai otoritas yang sah di Yaman, dan Sangat penting untuk menyadari bahwa situasi di Yaman sangat kompleks, melibatkan banyak aktor dan kepentingan yang bersaing. Sementara gerakan Houthi dimulai sebagai kekuatan oposisi, tindakannya dan konflik selanjutnya menyebabkan penderitaan yang meluas dan prospek penyelesaian damai yang rumit. Upaya sedang dilakukan untuk menemukan penyelesaian konflik yang dirundingkan dan meringankan krisis kemanusiaan di Yaman (Carboni 2021). Sangat penting untuk menyadari bahwa situasi di Yaman sangat kompleks, melibatkan banyak aktor dan kepentingan yang bersaing. Sementara gerakan Houthi dimulai sebagai kekuatan oposisi, tindakannya dan konflik selanjutnya menyebabkan penderitaan yang meluas dan prospek penyelesaian damai yang rumit. Upaya sedang dilakukan untuk menemukan penyelesaian konflik yang dirundingkan dan meringankan krisis kemanusiaan di Yaman.

Pengambilalihan Houthi di Yaman dimulai ketika revolusi melawan presiden Yaman Abdurabbuh Mansur Hadi yang dipimpin oleh Houthi dan pendukungnya yang menggulingkan pemerintah Yaman. Hal ini dimulai ketika pemerintah Yaman mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak sebagai bagian dari program subsidi yang bertujuan untuk datangnya investasi dari luar negeri. Pada tahun 2014 terjadi pertempuran di kota Sanaa. Pertempuran dimulai pada 9 September 2014, ketika pengunjuk rasa pro-Houthi di bawah komando

Abdul-Malik al-Houthi berbaris di kantor kabinet dan ditembaki oleh pasukan keamanan, menyebabkan tujuh orang tewas. Kemudian pada 18 september di tempat stasiun TV Yaman terjadi pertarungan lagi antara Houthi dan Militer Yaman untuk memperebutkan tempat tersebut. Hal ini dilakukan pasukan Houthi untuk mengunci tempat titik-titik kunci di kota tersebut agar menekankan pemerintah bahwa mereka tidak puas, akibatnya konflik ini berakibat krisis politik di Yaman (Karasik 2020).

Akibat dari konflik ini melahirkan krisis politik di Yaman. Kekuasaan Yaman kini terbagi antara presiden Hadi dan koalisi presiden Saleh, kedua belah pihak memfokuskan diri untuk mempertahankan kekuasaan mereka . Konflik politik Yaman yang telah merusak tatanan dan stabilitas ekonomi Yaman dan tentu merugikan masyarakat. Hal ini menyebabkan terbengkalainya kondisi masyarakat yang kian memprihatinkan, terlebih pemadaman listrik yang menghambat aktivitas masyarakat. Selain itu ekonomi Yaman kian melemah setelah kekayaan alam terkuras akibat suap yang dilakukan oleh Salah kepada pendukungnya selama kepemimpinannya (M.-L. Clausen 2015). Sumber daya alam Yaman bergantung pada minyak, namun seiring berjalannya waktu terus menyusut dan tidak adanya alternatif lain.

Dengan terjadinya konflik ini membuat pemerintah Yaman sulit mengakses pangan ke kota yang lagi berkonflik seperti kota Sanaa. Hal ini membuat bertambah parah situasi pangan di Yaman. Dari pernyataan di atas menjadi sinyal bahwa kepentingan Houthi mempengaruhi kebijakan pemerintah Yaman permasalahan yang di awalnya untuk mengatasi krisis pangan menjadi tidak fokus karena

pemerintah Yaman menangani krisis pangan dan perang internal dengan pihak oposisi. Sehingga, pemerintah Yaman harus mengubah kebijakan lagi untuk mengatasi dua permasalahan tersebut.

3.1.2 Birokrasi Yaman

Peranan birokrat dalam mengatasi krisis pangan sudah dilakukan sejak terjadinya Arab Spring di Yaman. Pemerintah Yaman membuat kebijakan untuk mengatasi krisis pangan yaitu NFSS. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan ini tidak berjalan dengan lancar. Karena kurangnya dana yang tersedia untuk mengimplementasi kebijakan NFSS tersebut meskipun sudah didukung oleh PBB. Kurangnya kapabilitas dan isu korupsi dari pemerintah Yaman itu sendiri membuat makin terhambatnya untuk mengatasi krisis pangan. Dengan sebagian besar kementerian hampir tidak berfungsi dan fokus pemerintah Yaman terbagi dua yaitu mengatasi krisis pangan dan memerangi pasukan Houthi. Kemudian pemerintah Yaman tidak merata membagikan bantuan makanan ke wilayahnya karena ada beberapa daerah yang terkena dampak konflik seperti kota Sanaa, kota Hodeidah dan kota Ibb (Sadewi, Dewi dan Suwecawangsa 2018).

Yaman secara luas dianggap sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Korupsi merajalela di seluruh pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat Yaman. Ini adalah hambatan utama bagi pembangunan, stabilitas, dan pemerintahan yang baik di negara ini. Korupsi di Yaman mengambil banyak bentuk, termasuk suap, penggelapan, nepotisme, dan penyalahgunaan dana publik. Ini lazim di semua cabang pemerintahan, termasuk peradilan, polisi, dan militer. Ini juga mempengaruhi sektor swasta, yang sering dikaitkan dengan pemberian kontrak dan lisensi. Penyebab korupsi di Yaman sangat kompleks dan saling terkait. Itu

termasuk aturan hukum yang lemah, kurangnya akuntabilitas, kemiskinan yang meluas, dan sejarah kesukuan dan politik patronase (Dbwan 2014). Konflik yang sedang berlangsung di negara tersebut telah memperburuk masalah ini, karena berbagai faksi berusaha mengeksploitasi kekacauan untuk keuntungan mereka sendiri. Upaya untuk memberantas korupsi di Yaman terbatas, karena kapasitas kelembagaan pemerintah yang lemah dan kurangnya kemauan politik di antara mereka yang berkuasa. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia telah mendukung inisiatif anti-korupsi di Yaman, tetapi kemajuannya lambat. Secara keseluruhan, korupsi merupakan tantangan yang signifikan bagi Yaman, dan menanganinya akan sangat penting bagi stabilitas dan pembangunan jangka panjang negara tersebut (Marriot 2013).

Dalam peran politik luar negeri, pemerintah Yaman diwakili oleh Kementerian perencanaan dan kerja sama Yaman bekerja sama dengan *Internasional Food Policy Research Institute* (IFPRI) dengan aliran dana dari komisi Eropa dan di kelola IFPRI untuk mengatasi krisis pangan pada tahun 2011. Kebijakan ini mempererat relasi dengan organisasi internasional. Dengan bantuan stakeholder ini menjadikan alat untuk mengatasi krisis pangan. Pemerintah Yaman juga bekerja sama dengan organisasi internasional seperti WFP. walaupun sudah dibantu oleh organisasi tersebut pemerintah Yaman tetap mengalami kesulitan dalam mengatasi krisis pangan akibat dari eskalasi konflik.

3.1.3 Kepentingan Partai Politik di Yaman

Yaman adalah negara yang terletak di ujung selatan Jazirah Arab. Karena perang saudara dan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung, lanskap politik di Yaman telah mengalami perubahan yang signifikan, dan kehadiran serta

pengaruh partai politik telah berfluktuasi. Yaman memiliki tiga partai politik besar yang mendominasi di pemerintahan. Berikut ketiga partai tersebut:

- a. Kongres Rakyat Umum (GPC): GPC adalah partai yang berkuasa di Yaman di bawah mantan Presiden Ali Abdullah Saleh. Itu adalah kekuatan politik yang dominan di Yaman selama beberapa dekade, tetapi pengaruhnya telah menurun secara signifikan sejak pecahnya perang saudara pada tahun 2014.
- b. Partai Islah (Jemaat Yaman untuk Reformasi): Islah adalah partai politik Islam Sunni yang memiliki basis dukungan yang luas. Ini adalah koalisi kelompok suku dan agama, termasuk Ikhwanul Muslimin. Islah telah memainkan peran penting dalam politik Yaman dan telah terlibat dalam berbagai aliansi politik dan perebutan kekuasaan.
- c. Partai Sosialis Yaman (YSP): YSP adalah partai sosialis dengan pengikut yang signifikan di Yaman selatan. Itu adalah partai yang berkuasa di bekas Republik Demokratik Rakyat Yaman, yang berdiri hingga penyatuan Yaman Utara dan Selatan pada tahun 1990. YSP telah menghadapi perpecahan dan tantangan internal tetapi terus aktif di arena politik.

Dalam merumuskan kebijakan pemerintah, hanya partai yang memenangkan pemilihan umum yang dapat mengambil keputusan. Ketika GPC memenangkan pemilihan umum saat itu adalah Ali Abdullah Saleh sebagai presiden dan Abdu Mansur Hadi sebagai wakil presiden, mereka yang mengatur pemerintahan yang absolut. Mereka tidak mendengarkan opini dari partai oposisi dalam mengambil keputusan kebijakan.

Partai politik beroperasi di Yaman berdasarkan Undang-Undang Partai dan Organisasi Politik No. (66) tahun 1991, yang menganggap partai sebagai “hak dan pilar sistem politik dan sosial.” Namun, undang-undang ini cenderung ditegakkan secara selektif dan ketentuannya menguntungkan pihak besar, memungkinkan mereka untuk mengakses bantuan negara; partai-partai kecil dengan jumlah suara yang tidak mencukupi dan perwakilan di parlemen dikecualikan. UU No. 66 juga menjabarkan sistem yang memungkinkan partai berkuasa mengontrol penerimaan dan penolakan permohonan pembentukan partai baru. Tapi yang paling merusak fungsi partai politik di Yaman adalah perang saat ini. Agar partai politik berfungsi, pertama-tama harus ada negara yang mampu menegakkan supremasi hukum (Al-Ganad 2022).

Dengan pernyataan di atas tersebut menjadi sinyal bahwa partai yang memenangkan pemilihan umum akan mempengaruhi kebijakan pemerintah Yaman. Sehingga partai yang memenangkan pemilihan umum maka mereka yang dapat mengambil keputusan yang absolut. Namun dengan adanya konflik internal di Yaman membuat dengan tidak adanya visi nasional yang inklusif, partai-partai telah mengembangkan visi subnasional yang tidak sejalan dengan proyek negara. Lingkungan kerja multipartai telah dihancurkan oleh praktik eksklusif dari berbagai kekuatan politik, ketidakpatuhan terhadap referensi legislatif yang mengikat karena konflik dan dominasi kelompok militer setelah dialog berubah menjadi kekerasan (Ardemagni 2021). Dalam situasi saat ini, kekuatan *de facto* berkuasa di berbagai bagian negara yang tidak mengakui satu sama lain maupun otoritas presiden sementara.

3.1.4 Media Massa

Pada awalnya Media Massa dipegang oleh perusahaan swasta. Hal ini ditunjukkan ketika kantor berita Aden didirikan pada tahun 1970 dan saluran televisi Sana'a di tahun 1975. Pada masa itu hak kebebasan untuk berbicara masih diperbolehkan untuk memungkinkan muncul surat kabar partisan dan non-partisan, sehingga para aktor politik dan masyarakat sipil leluasa menggunakan media tersebut. Namun pada terdapat UU No. 25 yang mengatur tentang pembatasan terhadap kebebasan informasi pada pasal 103 yang berisi tidak boleh mengkritik kepala negara atau pengikutnya. Kemudian pemerintah Yaman berupaya untuk membuat UU media massa untuk mengontrol secara penuh. Setelah pasukan Houthi mengambil alih kota Sanaa pada september 2014, perubahan media di Yaman berubah drastis. Mereka menguasai semua media yang dikelola oleh negara termasuk saluran televisi, situs web cetak dan online dan stasiun radio (Al-Shami 2021).

Kebebasan berekspresi di Yaman sangat buruk. Menurut indeks dari *Reporters Without Borders* 2011 Yaman menempati posisi ke 171 sebagai negara jauh dari kebebasan pers. Semua pihak dalam konflik di Yaman melakukan pelanggaran berat terhadap jurnalis. Semua pihak dalam konflik terpaksa menekan kebebasan berekspresi, menggunakan penahanan kewenangan, menculik para jurnalis, penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya. Jurnalis dan pembela hak asasi manusia termasuk di antara mereka yang menjadi sasaran (Al-Emad 2020). Kemudian dengan pembagian antara wilayah dikuasai oleh Houthi dan wilayah dikuasai oleh pemerintah Yaman membuat lanskap media berubah. Karena mereka memberi informasi tentang posisi mereka sebagai penguasa daerah. Korban dari

pengambilan alih media di kota Sanaa adalah stasiun radio milik komunitas. Opini publik sejak pasukan Houthi di kota Sanaa menyebabkan pemblokiran terhadap situs jurnalisme dan penutupan beberapa surat kabar, stasiun radio dan saluran televisi (SEMC 2017). Dari pernyataan di atas menjadi sinyal bahwa media massa dan opini publik di Yaman tidak mempengaruhi kebijakan Yaman.

Tabel 3. Pemberitaan media terhadap pemerintah Yaman

No	Nama Media	Ekposur	Tanggal Media	Tautan
1	Al Motamar	<i>President Saleh authorizes Hadi to conduct dialogue with opposition</i>	12 September 2011	https://www.almotamar.net/en/8575.htm
2	Al Motamar	<i>President Saleh says dialogue is the best way to address current crisis</i>	2 Agustus 2011	https://www.almotamar.net/en/8544.htm
3	Al Motamar	<i>WFP to provide food aid for 6 million Yemenis in 2014</i>	26 November 2013	https://www.almotamar.net/en/8784.htm
4	Al Motamar	<i>Yemen, EU sign €86 m agreements to enhance food security</i>	31 Desember 2013	https://www.almotamar.net/en/8843.htm
5	Al Motamar	<i>WFP allocates \$ 500 mln to improve food security in Yemen</i>	18 Juli 2014	https://www.almotamar.net/en/9171.htm
6	IFPRI	<i>Reactivating Yemen's National Food Security Strategy</i>	1 Oktober 2013	https://www.ifpri.org/blog/reactivating-yemen%E2%80%99s-national-food-security-strategy
7	Al Motamar	<i>New School Nutrition Projects Encourages Female Education</i>	22 Desember 2013	https://www.almotamar.net/en/8834.htm

3.2 Kapasitas Ekonomi dan Militer

3.2.1 Kapasitas Ekonomi

Krisis politik pada tahun 2011 di Yaman telah membuat kelemahan di struktural ekonomi yang telah berlangsung lama di negara tersebut, terutama kemampuan rakyatnya yang miskin untuk mengakses komoditas pokok seperti makanan dan air. Sekitar 43% populasi Yaman hanya hidup dengan 2 dollar US

sehari menurut data moneter internasional. Sementara itu presiden Ali Abdullah Saleh telah mengalokasikan kendali atas sebagian besar ekonomi negara kepada pendukungnya sebagai imbalan dari dukungan pemilu, hal ini membuat para pendukung melakukan semena-mena terhadap ekonomi negara yang berakibatkan korupsi. Perekonomian Yaman sangat terpengaruh oleh konflik yang sedang berlangsung, ketidakstabilan politik, dan krisis kemanusiaan (Salisbury 2011).

Sebelum krisis saat ini, Yaman sudah menjadi salah satu negara termiskin di dunia Arab, sangat bergantung pada pertanian, ekspor minyak, dan pengiriman uang. Konflik ini telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang meluas, termasuk sekolah, rumah sakit, dan pasar, menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan. Konflik yang sedang berlangsung memiliki konsekuensi yang menghancurkan ekonomi Yaman, dengan inflasi yang meroket, tingkat pengangguran yang tinggi, dan kemiskinan yang meluas. Terganggunya industri-industri utama, seperti pertanian dan perikanan, semakin memperburuk kerawanan pangan dan malnutrisi, dengan sebagian besar penduduk bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk kebutuhan dasar hidup.

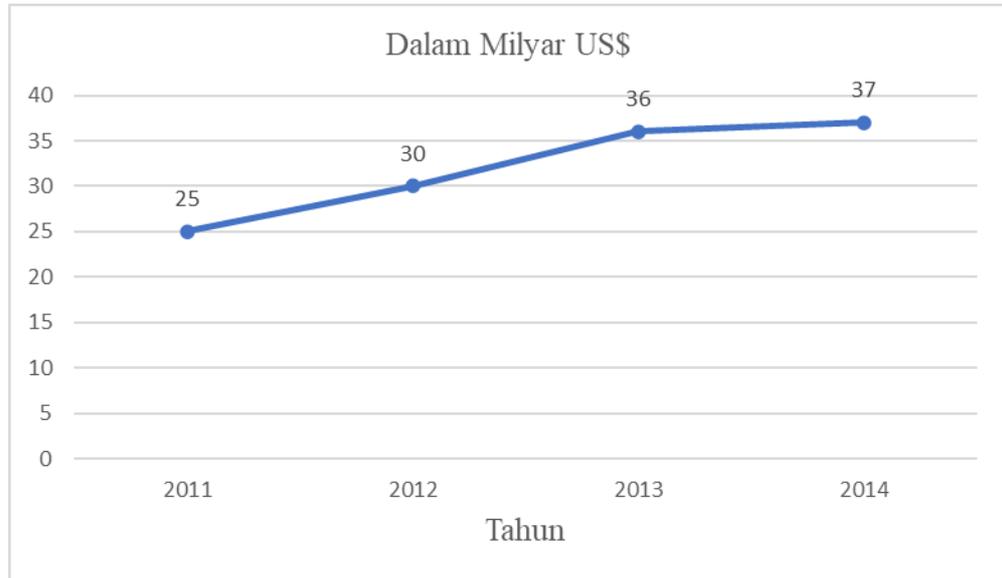
Produksi minyak Yaman, yang dulunya merupakan sumber pendapatan penting, juga anjlok akibat kerusakan infrastruktur dan blokade impor bahan bakar dan barang-barang penting lainnya. Hal ini semakin menekan ekonomi, karena ekspor minyak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah dan pendapatan devisa. Hal ini menjadi kerentanan ekonomi di Yaman karena akan membuat menggerogoti pendapatan pemerintah Yaman. Produksi minyak Yaman mengalami penurunan jangka panjang. Penurunan ini akan terus mengurasi pendapatan negara

sehingga semakin sulit untuk membayar tagihan impor yang seiring berjalannya waktu meningkat (Salisbury 2011).

Mata uang di Yaman, rial Yaman, telah terdepresiasi secara signifikan, menyebabkan kenaikan harga lebih lanjut dan membuat barang impor lebih mahal. Runtuhnya sistem perbankan dan kurangnya akses terhadap kredit telah menghambat aktivitas bisnis dan investasi. nilai tukar turun menjadi 1.000 Yemen rial (YER) per 1 dolar Amerika (USD) di selatan negara itu untuk pertama kalinya. Devaluasi membuat warga biasa tidak mampu membeli kebutuhan pokok, termasuk makanan. Ekonomi Yaman bukan hanya korban dari konflik brutal ini tetapi semakin menjadi pendorongnya, karena pihak-pihak bersaing untuk menguasai sumber daya dan institusi utama dengan mengorbankan warga biasa. Penyebab krisis ekonomi Yaman sangat kompleks dan saling berhubungan, namun dampaknya terhadap masyarakat yang sudah menderita setelah perang bertahun-tahun sudah jelas terlihat (IRC 2021).

Upaya untuk menstabilkan ekonomi Yaman dan mengakhiri konflik sedang berlangsung, tetapi situasinya tetap sangat menantang. Pemerintah Yaman sudah melakukan upaya untuk bencana ini dengan membuat kebijakan TPSD. Ekspektasi TPSD adalah dengan meningkatnya GPD Yaman akan tumbuh pada tingkat rata-rata 4,5% selama 2012-2014. Selain itu, peningkatan pendapatan per kapita bersih diharapkan rata-rata 1,5% per tahun (UNDP 2013). Kemudian data dari tahun 2011-2014 GNP yaman oleh *macrotrend.net* menyebutkan bahwa terjadi kenaikan berikut :

Grafik 1. Grafik pertumbuhan GNP di Yaman 2011-2014



sumber : (Macrotrends.net 2023)

Program TPSD berupaya menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan melalui program yang inklusif untuk menciptakan lingkungan yang tepat untuk mendorong sektor-sektor produktif. Perhatian khusus harus diberikan pada kesetaraan gender dan partisipasi angkatan kerja perempuan sebagai isu lintas sektoral dalam pembangunan sektor pertanian, meningkatkan ketahanan pangan, mencapai pemanfaatan perikanan secara optimal, menghidupkan kembali sektor pariwisata (untuk persiapan pembangunan jangka panjang) dan mengintensifkan upaya perluasan kegiatan eksplorasi migas (Al-Khali, Osamah dan Biswell 2019). Perserikatan Bangsa-Bangsa bekerja untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan mendukung upaya pemulihan ekonomi, tetapi penyelesaian konflik yang komprehensif sangat penting untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Yaman.

3.2.2 Kapasitas Militer

Menurut William D. Coplin kapasitas militer memiliki peran untuk dalam menentukan kebijakan negara. Kondisi militer di Yaman jauh dari kata aman, akibat dari dampak Arab Spring. Namun, penting untuk dicatat bahwa Yaman telah terlibat dalam konflik yang kompleks dan berkelanjutan sejak terjadinya Arab Spring, yang secara signifikan mempengaruhi struktur dan operasi militernya. Konflik tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, didukung oleh koalisi yang dipimpin oleh pemerintah Yaman itu sendiri dan berbagai kelompok pemberontak, terutama pemberontak Houthi. Ketidakstabilan internal khususnya militer inilah yang mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi krisis pangan. Hal ini menjadi tidak fokus dalam menangani masalah tersebut.

Arab Spring memiliki efek destabilisasi pada pemerintah Yaman dan menghasilkan restrukturisasi aliansi yang mengejutkan. Gelombang protes di dunia Arab juga mencapai Yaman, dengan demonstrasi massal di ibu kota Sana'a dan kota-kota lain. Protes memicu perebutan kekuasaan internal di dalam pemerintahan dan pembelotan massal dari tentara. Tanpa basis dukungannya di militer, Saleh tidak mampu mempertahankan kendali negara. Di bawah tekanan kuat dari Arab Saudi dan Dewan Kerja sama Teluk (GCC), Saleh menerima kesepakatan untuk menyerahkan kekuasaan kepada Abdrabbuh Mansur Hadi (wakil presiden sejak 1994 dan juga mantan perwira tinggi militer). Meskipun hal tersebut tampak sebagai pengocokan internal kosmetik, hal itu secara mendasar mengubah keseimbangan kekuatan (Armstradewatch.eu 2019). Dalam upaya untuk

mendapatkan kembali kendali, Saleh bersekutu dengan mantan musuhnya, Houthi. Pada tahun 2014 Houthi menguasai provinsi Sa'dah dan pada bulan September pejuang Houthi menguasai ibu kota. Tentara Yaman, yang sebagian besar berada di bawah kendali anggota keluarga Saleh, tidak ikut campur selama pengambilalihan. PBB gagal mencoba menengahi pemerintah persatuan. Pada Januari 2015, setelah perselisihan atas usulan konstitusi baru, pejuang Houthi menduduki Istana Kepresidenan dan beberapa lembaga pemerintah. Mereka memaksa presiden Hadi untuk mengundurkan diri dan menempatkannya sebagai tahanan rumah (Al-Jalal 2015).

Kemiliteran di Yaman terpecah menjadi beberapa bagian, yang pertama yaitu militer berpihak saleh, mereka yang setia kepada saleh terus berlanjut panggung politik, karena ia masih menikmati loyalitas pribadi dari beberapa perwira tinggi yang dia ditunjuk selama masa kepresidenannya. Tentara Yaman sebagian berada di kendali Saleh. Upaya Hadi untuk membersihkan pasukan pendukung Saleh menjadi bumerang dan menyebabkan pemberontakan, yang memungkinkan Houthi mengambil alih ibu kota dan pemerintah secara bertahap. Ketika Houthi secara resmi mengambil alih pemerintahan, Saleh bergabung dengan mereka, membawa sekitar dua pertiga dari militer Yaman bersamanya (Arraf 2017). Unit militer di bawah kendali Mayor Jenderal Ali Mohsen Al Ahmar mendukung partai Islah, sebuah partai Islam yang secara historis terkait dengan Ikhwanul Muslimin. Presiden Hadi dibiarkan tanpa dukungan dari militer tetapi hanya beberapa unit. Kemudian militer yang berpihak kepada presiden Hadi. presiden Hadi menunjuk Ali Mohsin, mantan sekutu Saleh, sebagai wakil panglima tertinggi angkatan bersenjata dalam upaya untuk mengumpulkan dukungan dari suku

setempat dan pemimpin militer. Namun pada akhirnya presiden Hadi gagal mendapat kepercayaan dari militer yang setia kepada presiden Saleh dan masyarakat banyak orang selatan yang tidak percaya padanya mengingat perannya di Perang Saudara Yaman 1994, di mana dia bertempur di pihak tentara utara (Alley 2018).

3.3 Konteks Internasional

3.3.1 Arab Spring di Yaman

Arab Spring merupakan sebuah gerakan protes beberapa negara Arab kepada pemerintah yang menginginkan demokrasi, yang terjadi pada musim semi pada tahun 2011. Selain itu masyarakat Arab menyebut peristiwa *Arab Spring* sebagai peristiwa *al-Tsaurat al-Arabiyah* yang artinya sebuah gerakan yang akan mengubah sistem pemerintahan dan susunan masyarakat menjadi lebih baik (Britannica 2022). Istilah *Arab Spring* pertama kali digunakan oleh bangsa Eropa dengan istilah *People's Spring* ketika terjadi konflik politik yang menuntut revolusi menjadi demokrasi pada tahun 1848, sehingga semenjak saat itu musim semi menjadi gambaran gerakan tuntutan demokrasi masyarakat (History 2010). Aksi Arab Spring berdampak besar terhadap stabilitas negara-negara Arab, seperti politik Islam di negara-negara Arab semakin menguat, tidak stabilnya harga minyak dunia, memunculkan celah bagi negara barat untuk mengintervensi politik Timur Tengah, dan merebaknya krisis bagi masyarakat.

Aksi protes ini berlangsung sejak Desember 2010 dengan besar yang menuntut lengsernya kekuasaan pemerintah negara seperti Tunisia, Maroko, Suriah, Libya, Mesir, dan Bahrain yang telah berkuasa sejak lama, otoriter dan tidak

menunjukkan tanda akan bergantinya rezim yang sedang berkuasa (History 2018). Dengan berjalan waktu penduduk semakin padat yang menyebabkan kesenjangan sosial semakin tinggi hari demi hari. Janji-jani yang diberikan pemerintah tidak kunjung ditepati dan propaganda perbandingan dengan negara lain menjadi salah satu dorongan dalam terjadinya *Arab Spring* (Kienle 2012).

Gerakan Arab Spring pertama kali terjadi di Tunisia, pada tanggal 17 Desember 2010 di Tunisia Tengah seorang pedagang kaki lima bernama Mohamed Bouazizi membakar diri sendiri sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Tunisia. Aksi yang dilakukan oleh Mohamed Bouazizi tersebut didasari oleh tindakan pemerintah setempat yang menyulitkan pedagang mendapatkan izin dan menyita paksa barang pedagang jalanan oleh aparat karena berdagang tidak mendapatkan izin (Ajami 2012). Aksi Bouazizi tersebut menyebar ke seluruh Tunisia yang menyebabkan bertambahnya demonstran dan semakin tidak bisa dikontrol yang menuntut turunnya presiden Zine El Abidine Ben Ali, peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan istilah *Tunisia's Jasmine Revolution*. Pemerintah Tunisia berusaha untuk meredam demonstran dengan menggunakan kekerasan dan selain itu pemerintah Tunisia juga menawarkan kesepakatan politik dan ekonomi. Namun bukannya mereda demonstran semakin anarkis yang menyebabkan aparat keamanan negara tidak bisa membendung keadaan. Akhirnya pada tanggal 14 Januari 2014 presiden Zine El Abidine Ben Ali mundur dari pemerintahan setelah menjabat selama 23 tahun dan pergi melarikan diri ke Arab (Aljazeera 2020). Kejadian tersebut menimbulkan motivasi bagi negara-negara Arab lainnya yang memulai melakukan aksi memprotes dan pemberontakan pemerintah yang otoriter, korupsi, dan ketimpangan sosial. Di Mesir pada 25 Januari 2011, ribuan warga

turun ke jalan di kota Kairo untuk menuntut lengsernya kepemimpinan presiden Hosni Mubarak yang telah menjabat selama 30 tahun. Sehingga pada 11 Februari setelah jutaan warga melakukan demonstrasi presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri dan menyerahkan kendali pemerintahan ke militer. Oleh karena itu Mesir berada di bawah kekuasaan militer yang ketat, beberapa pendapat mengatakan semenjak itu hak dan kebebasan warga Mesir menjadi seimbang (Ebrahim 2022).

Aksi unjuk rasa yang terjadi di Tunisia dan Mesir menunjukkan keberanian rakyat untuk melawan dan menghadapi pemimpin otoriter, dan berhasil mendapatkan keadilan dan mereformasi politik mereka seakan menjadi dorongan bagi negara Arab lainnya untuk mendapatkan kebebasan juga. Namun tidak semua negara yang melakukan aksi tersebut berujung baik, seperti yang terjadi di Yaman aksi mereka berakhir menjadi perang saudara bahkan terpecah dan di landa dengan kemiskinan. Aksi protes bermula ketika pemuda dan aktivis masyarakat sipil Yaman bersama menuntut perubahan rezim. Hal ini disebabkan oleh pemimpin mereka yaitu Ali Abdullah Saleh telah memerintah Yaman selama 33 tahun, dan telah gagal membawa Yaman lebih maju dan lambatnya reformasi (Alley 2013). Bahkan sebelum terjadinya Arab Spring Yaman telah menghadapi gelombang krisis ekonomi dan sosial, di mana cadangan air negara yang terus berkurang, menurunnya cadangan minyak yang berimbas pada pendapatan negara, lonjakan populasi yang terus meningkat, kurangnya pembangunan infrastruktur, pendidikan yang rendah dan tingkat korupsi yang tinggi. Selain itu konflik politik yang terjadi antara 2 kelompok Houthi dan Syiah yang memperebutkan daerah otonom yang lebih besar yang mengakibatkan terjadinya perang saudara (Juneau 2013).

Pada 27 Februari 2012, Ali Abdullah Saleh menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya Abdrabuh Mansur Hadi. Meskipun Ali Abdullah Saleh telah mundur dari kursi presiden Yaman, namun Ali Abdullah Saleh masih tetap memegang kekuasaan unit elit militer dan dinas keamanan Yaman. Saleh bersama putra dan tiga keponakannya menolak untuk melepas posisinya dan tetap mengendalikan badan penting militer negara. Anak dari Ali Abdullah Saleh, yaitu Ahmed Saleh merupakan komandan pengawal dan pasukan khusus Yaman dan ketiga ponakannya merupakan pemimpin unit elit (Kronenfield dan Guzansky 2014). Di bawah kepemimpinan Abdrabuh Mansur Hadi demonstrasi menjadi berkurang, namun tidak membuat situasi menjadi kondusif karena tidak dapat memperbaiki stabilitas politik dan mengamankan kelompok-kelompok kontra pemerintah.

Kekuasaan Yaman kini terbagi antara presiden Hadi dan koalisi Saleh, kedua belah pihak memfokuskan diri untuk mempertahankan kekuasaan mereka (Brehony 2015). Konflik politik Yaman yang telah merusak tatanan dan stabilitas ekonomi Yaman dan tentu merugikan masyarakat. Hal ini menyebabkan terbelakainya kondisi masyarakat yang kian memprihatinkan, terlebih pemadaman listrik yang menghambat aktivitas masyarakat. Selain itu ekonomi Yaman kian melemah setelah kekayaan alam terkuras akibat suap yang dilakukan oleh Saleh kepada pendukungnya selama kepemimpinannya (M. L. Clausen 2015). Sumber daya alam Yaman bergantung pada minyak, namun seiring berjalannya waktu terus menyusut dan tidak adanya alternatif lain. Terlebih sejak terjadinya Arab Spring ekspor minyak dan gas terhenti, yang menyebabkan perekonomian merugi dan melonjaknya pengangguran. Krisis kemanusiaan yang terus meningkat, dengan banyaknya masyarakat yang membutuhkan pasokan makanan dan tidak

sedikitnya anak yang kekurangan gizi yang memperburuk kondisi di Yaman. Meningkatnya pembajakan dan terorisme di perairan Yaman yang menghambat masuknya bantuan komersial yang mengakibatkan perubahan rute yang lebih lama dan biaya yang mahal, dan maraknya perdagangan manusia (Zarmina Islam 2021). Pemerintahan baru masih tidak bisa membendung para pembajak dan ketidakmampuan atau keengganan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah membangun kepercayaan dalam hal keamanan, tanah, dan pekerjaan. Bahkan kondisi Yaman setelah tahun 2011 lebih parah dari sebelumnya dan menyebabkan Yaman sebagai negara termiskin (BBC 2023).

3.3.2 Peran WFP di Yaman

World Food Programme (WFP) sudah beroperasi di Yaman sejak 1967 ketika pada perang saudara Yaman utara dan selatan. Yaman sangat bergantung kepada bantuan WFP akibat dampak perang yang belum berhenti. WFP merupakan organisasi kemanusiaan bagian dari PBB terbesar di dunia yang bertugas untuk menyelamatkan manusia dari kelaparan dari konflik dan bencana alam. Dalam misi menuntaskan krisis pangan yang terjadi, pemerintah Yaman menggunakan WFP untuk mendiskusikan masalah krisis pangan ini. Tujuan utama WFP di Yaman adalah untuk memberikan bantuan makanan yang menyelamatkan jiwa dan meningkatkan gizi di antara populasi yang rentan, termasuk pengungsi internal, anak-anak, dan wanita hamil atau menyusui (Kosiewicz 2017). Berikut adalah beberapa poin penting tentang pekerjaan WFP di Yaman:

- a. Bantuan pangan darurat: WFP memberikan bantuan pangan kepada jutaan orang di Yaman yang menderita kekurangan pangan akut.

Mereka membagikan jatah makanan, yang biasanya terdiri dari sereal, kacang-kacangan, minyak sayur, dan barang-barang penting lainnya.

- b. Program pemberian makan di sekolah: WFP mendukung program pemberian makan di sekolah untuk mendorong pendaftaran dan kehadiran anak-anak di sekolah. Dengan menyediakan makanan bergizi, program ini membantu mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi di antara anak-anak sekolah.
- c. Dukungan nutrisi: WFP mengimplementasikan program nutrisi yang menargetkan anak-anak kurang gizi dan wanita hamil atau menyusui. Mereka menyediakan makanan bergizi khusus dan layanan dukungan untuk mencegah dan mengobati malnutrisi, termasuk melalui pengobatan malnutrisi akut sedang.
- d. Rantai pasokan dan logistik: WFP mengoperasikan jaringan logistik yang kuat di Yaman untuk memastikan pengiriman makanan dan pasokan kemanusiaan lainnya tepat waktu. Ini termasuk mengelola fasilitas penyimpanan, armada transportasi, dan berkoordinasi dengan mitra lokal untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
- e. Transfer berbasis tunai: Selain distribusi makanan dalam bentuk barang, WFP juga menggunakan program transfer berbasis tunai. Pendekatan ini memungkinkan penerima manfaat untuk memilih dan membeli makanan dari pasar lokal, merangsang ekonomi lokal dan memberikan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan diet mereka yang unik.

- f. Survei dan penilaian Gizi: WFP melakukan penilaian dan survei rutin untuk memantau status gizi populasi yang rentan. Survei ini membantu mengidentifikasi area dan komunitas yang memerlukan perhatian segera dan bantuan dalam merancang intervensi yang efektif.

Tabel 4. Ringkasan Analisis

No	Variabel Coplin	Aplikasi
1	Politik Domestik	<ul style="list-style-type: none"> • Kepentingan Houthi: untuk mengatasi keluhan komunitas Zaidi Yaman, yang mereka anggap terpinggirkan dan didiskriminasi oleh pemerintah Yaman. Mereka memanfaatkan ketidakpuasan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, khususnya di wilayah utara Yaman, dan berhasil menggalang dukungan. • Birokrasi Yaman: menggunakan organisasi sebagai alat mengatasi krisis pangan di Yaman. • Kepentingan partai politik di Yaman: partai yang memenangkan pemilihan umum akan mempengaruhi kebijakan pemerintah Yaman. Sehingga partai yang memenangkan pemilihan umum maka mereka yang dapat mengambil keputusan yang absolut • Media massa di Yaman: diatur oleh pemerintah Yaman. Pembagian antara wilayah dikuasai oleh Houthi dan wilayah dikuasai oleh pemerintah Yaman membuat lanskap media berubah. Karena mereka

		<p>memberi informasi tentang posisi mereka sebagai penguasa daerah.</p>
2	Ekonomi & Militer	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan terjadinya perang sipil di Yaman membuat ketidakstabilan militer di Yaman tercipta beberapa kubu seperti Pro Presiden Ali, Pro Presiden Hadi dan Pasukan Houthi. • Ekonomi Yaman bergantung kepada ekspor dari luar negeri, upaya mendorong kenaikan ekonomi terutama di GNP sudah dilakukan seperti membuat kebijakan TPSD namun upaya tersebut gagal karena eskalasi konflik.
3	Konteks Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2011 akhir, lingkungan internasional di Yaman tepatnya di Timur tengah mengalami fenomena Arab Spring yang di mana Yaman tidak berujung baik, aksi mereka berakhir menjadi perang saudara bahkan terpecah dan di landa dengan kemiskinan. • Dengan terjadinya konflik internal di Yaman dan ketidakmampuan pemerintah Yaman dalam mengatasi krisis pangan, Yaman akhirnya bergantung kepada organisasi khususnya World Food Programme. WFP memiliki beberapa program yang dikerjakan di Yaman antara lain: Bantuan pangan darurat, Program pemberian makan di sekolah, Dukungan nutrisi, Rantai pasokan dan logistik, Transfer berbasis tunai.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Yaman adalah negara Arab termiskin di dunia. Negara ini memiliki sekitar 27,4 juta orang dengan sumber daya alam kronis dan kekurangan makanan. Banyak data dari Organisasi Internasional melaporkan krisis kemanusiaan di Yaman termasuk krisis pangan. Menurut *World Food Programme* sekitar 7.3 juta orang Yaman membutuhkan makanan yang layak. Konflik di Yaman telah mempengaruhi kondisi ekonomi serta aksesibilitas makanan secara signifikan. Konflik juga mempengaruhi kondisi internal di Yaman. Pemerintah Yaman akhirnya membuat kebijakan untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi. Kebijakan itu dibuat pada tahun 2011 yang bernama *National Food Security System (NFSS)* namun hanya berjalan satu tahun akibat kekurangan dana. Kemudian ditahun berikutnya pemerintah Yaman membuat kebijakan *Transitional Programme and Stabilization Development (TPSD)* dan mengalami kegagalan walaupun mencantumkan poin memenuhi kebutuhan mendesak tetapi hal tersebut tidak berfokus kepada situasi pangan.

Faktor yang mempengaruhi kegagalan kebijakan dalam mengatasi krisis pangan di Yaman terdapat tiga variabel. Variabel yang pertama adalah politik domestik, berisi empat aktor yaitu pengaruh kepentingan kelompok, kepentingan birokrat, kepentingan partai politik, dan kepentingan media massa. Kelompok Houthi memiliki pengaruh yang kuat terhadap kegagalan kebijakan dalam mengatasi krisis pangan, karena membuat pemerintah Yaman tidak fokus dalam yang tadinya hanya melawan krisis pangan kini harus melawan kelompok Houthi. Pasukan Houthi juga memblokir beberapa bangunan penting seperti di pelabuhan

Al Hodeidah. Hal ini juga menghambat pergerakan saluran bantuan ke seluruh penjuru Yaman.

Peran birokrasi di Yaman awalnya berjalan sesuai tugasnya namun seiring berjalannya waktu birokrasi Yaman mengalami kekacauan, terdapat korupsi menjadi hambatan dalam mengatasi krisis pangan di Yaman. Dalam perannya untuk mengatasi krisis pangan, pemerintah Yaman diwakili oleh Kementerian perencanaan dan kerja sama Yaman bekerja sama dengan organisasi internasional yaitu WFP, hal ini dapat mempererat relasi kedua aktor tersebut. Dalam perumusan kebijakan di Yaman hanya partai politik yang menang pemilu saja dapat mengambil keputusan. Namun dengan adanya konflik internal di Yaman membuat dengan tidak adanya visi nasional yang inklusif, partai-partai telah mengembangkan visi subnasional yang tidak sejalan dengan proyek negara. Kemudian media massa tidak terlalu memberikan efek signifikan terhadap kegagalan kebijakan dalam mengatasi krisis pangan. Hal ini dikarenakan opini publik di Yaman di tekan oleh pemerintah dan pasukan Houthi.

Kemudian di dalam domestik Yaman sendiri mengalami perang sipil. Akibatnya, terdapat dua kubu di negara Yaman yaitu pasukan Houthi di kota Sana'a dan pemerintah transisi di kota Aden. Konflik ini menghasilkan ketiadaan sinkronisasi kebijakan untuk mengatasi krisis pangan di Yaman sehingga konsekuensi krisis pangan terus berlanjut. Ketiadaan *single government* yang pasti membuat krisis pangan terus berlanjut.

Variabel kedua yaitu kapasitas ekonomi dan militer. Pada kapasitas ekonomi, krisis politik pada tahun 2011 di Yaman telah membuat kelemahan di struktural ekonomi yang telah berlangsung lama di negara tersebut, terutama

kemampuan rakyatnya yang miskin untuk mengakses komoditas pokok seperti makanan dan air. Konflik yang sedang berlangsung memiliki konsekuensi yang menghancurkan ekonomi Yaman, dengan inflasi yang meroket, tingkat pengangguran yang tinggi, dan kemiskinan yang meluas. Terganggunya industri-industri utama, seperti pertanian dan perikanan, semakin memperburuk kerawanan pangan. Kebijakan TPSD yang dibuat berupaya menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan melalui program yang inklusif untuk menciptakan lingkungan yang tepat untuk mendorong sektor-sektor produktif. Eskalasi konflik terus berjalan membuat kebijakan ini dihentikan.

Pada kapasitas militer, terdapat ketidakstabilan militer internal di Yaman. Terdapat perpecahan antara militer yang berpihak kepada presiden Ali Abdullah Saleh dan militer yang berpihak kepada Presiden Mansour Hadi. Militer yang berpihak kepada Presiden Mansour Hadi dipimpin oleh Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi, memiliki pasukan militernya sendiri. Pasukan ini didukung oleh koalisi negara-negara Arab yang dipimpin Saudi dan terutama terlibat dalam pertempuran melawan pemberontak Houthi.

Pada variabel ketiga konteks internasional, awal mula krisis politik ini ketika terjadinya Arab Spring pada tahun 2011 di mana masyarakat di Yaman terinspirasi dari Tunisia. Aksi protes bermula ketika pemuda dan aktivis masyarakat sipil Yaman bersama menuntut perubahan rezim. Hal ini disebabkan oleh pemimpin mereka yaitu Ali Abdullah Saleh telah memerintah Yaman selama 33 tahun, dan telah gagal membawa Yaman lebih maju dan lambatnya reformasi. Kemudian dengan dampak yang ditimbulkan WFP membantu Yaman dalam mengatasi krisis ini, WFP yang sudah berjalan sejak dari lama berkomitmen untuk

membantu masyarakat Yaman yang terkena dampak tersebut. Terdapat enam program yang dijalankan oleh WFP di Yaman yaitu, Bantuan pangan darurat, pemberian makanan khusus di sekolah, dukungan kesehatan, menyalurkan logistik, memberi transfer tunai, dan survei dan penilaian gizi.

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penyebab kegagalan kebijakan pemerintah Yaman dalam mengatasi krisis pangan tidak lepas dari Politik domestik, Kapasitas ekonomi dan militer, dan konteks internasional.

4.2 Rekomendasi

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Kegagalan Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Yaman Dalam Mengatasi Krisis Pangan pada Arab Spring tahun 2011-2014” masih terdapat kekurangan dalam analisis maupun penulisan. Penelitian ini juga secara spesifik membahas pasca Arab Spring dan sebelum terjadinya perang saudara. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya mungkin akan membahas isu yang sama dapat membahas kelanjutan sejak pecahnya perang saudara di Yaman, bagaimana keadaan krisis pangan saat perang saudara terjadi, dan setelah presiden Hadi turun jabatan. Mengingat sekarang Yaman sudah mempunyai presiden baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajami, Fouad. "The Arab Spring at One: A Year of Living Dangerously." *Foreign Affairs*, April 2012: 56-65.
- Alasarar, Fatima Abo. *The Houthis' war and Yemen's future*. 23 September 2022. <https://www.mei.edu/publications/houthis-war-and-yemens-future> (accessed Juni 6, 2023).
- Al-Emad, Faker Mohammed. "Major Trends of Media Development in Yemen." *Global Scientific Journals*, 2020: 1021-2048.
- Al-Ganad, Tawfeek. *A History of Yemeni Political Parties: From Armed Struggle to Armed Repression*. 7 Februari 2022. <https://sanaacenter.org/publications/analysis/16421> (accessed Juni 19, 2023).
- Al-Jalal, Fares. *Yemen's year of destruction: the Houthis takeover of Sanaa*. 21 September 2015. <https://www.newarab.com/analysis/yemens-year-destruction-houthis-takeover-sanaa> (accessed Juli 9, 2023).
- Aljazeera. *What is the Arab Spring, and how did it start?* 17 Desember 2020. <https://www.aljazeera.com/news/2020/12/17/what-is-the-arab-spring-and-how-did-it-start> (accessed Juni 17, 2023).
- Al-Khali, Rafart, Al-Rawhani Osamah, and Anthony Biswell. *Transitional Government in Post-Conflict Yemen*. 5 Agustus 2019. <https://sanaacenter.org/publications/main-publications/7924> (accessed Juni 19, 2023).
- Alley, April Longley. *Collapse of the Houthis-Saleh Alliance and the Future of Yemen's War*. 11 Januari 2018. <https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/collapse-houthis-saleh-alliance-and-future-yemens-war> (accessed Juli 10, 2023).
- Alley, April Longley. "Yemen Changes Everything And Nothing." *Journal of Democracy*, Oktober 2013: 74-85.
- Al-Shami, Abdulrahman M. "Yemen: Unsettled Media for an Unsettled Country." *Arab Media Systems*, 2021: 197-214.
- Altamimi, Adeb, and Uddagatti Venkatesha. "Arab Spring in Yemen : Cause and Consequences." *An International Bilingual Peer Reviewed Referred Research Journal*, 2020: 59-63.
- Amin, Abu. "Crisis in Yemen and Countering Violence." *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 2015: 18-22.
- Ardemagni, Eleonora. *Yemen Ten Years on: Politics, Parties, and Mobilization*. 26 Maret 2021. <https://www.ispionline.it/en/publication/yemen-ten-years-politics-parties-and-mobilization-29770> (accessed Juni 19, 2023).
- Armstradewatch.eu. *War in Yemen, Made in Europe*. Oktober 2019. <https://yemen.armstradewatch.eu/> (accessed Juli 11, 2023).
- Arraf, Sari. *The Armed Conflict In Yemen: A Complicate Mosaic*. Laporan Perang, Swiss: Geneva Academy, 2017.

- BBC. *Yemen: Why is the war there getting more violent*. 13 April 2023. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29319423> (accessed Juni 19, 2023).
- Brehony, Noel. "Yemen and the Huthis: Genesis of the 2015 Crisis." *Asian Affairs*, 2015: 232-250.
- Britannica. *Arab Spring pro-democracy protests*. 23 November 2022. <https://www.britannica.com/event/Arab-Spring> (accessed Juni 16, 2023).
- Carboni, Andrea. *The Myth of Stability: Infighting and Repression in Houthi-Controlled Territories*. 9 Februari 2021. <https://acleddata.com/2021/02/09/the-myth-of-stability-infighting-and-repression-in-houthi-controlled-territories/> (accessed Juni 4, 2023).
- Clausen, Maria Louise. "Understanding the crisis in Yemen: Evaluating competing narratives." *The Internasional Spectator*, 2015: 16-29.
- Clausen, Maria-Louise. "Understanding the Crisis in Yemen: Evaluating Competing Narratives." *Italian Journal of International Affairs*, 2015: 16-29.
- Coplin, William D., and Maesedes Marbun. *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Dbwan, Abdulmoez. *World Bank Blog*. 4 Desember 2014. <https://blogs.worldbank.org/arabvoices/fighting-culture-corruption-yemen> (accessed Juni 16, 2023).
- Ebrahim, Nadeen. *The last 'Arab Spring' democracy is dangling by a thread*. 27 Juli 2022. <https://edition.cnn.com/2022/07/25/middleeast/tunisia-referendum-democracy-mime-intl/index.html> (accessed Juni 18, 2023).
- FAO. *Price Monitoring and Analysis Country Brief Yemen*. Februari 2012. <https://www.fao.org/3/an632e/an632e00.pdf> (accessed April 1, 2023).
- Fytrou, Nathalie. "World Food Crisis and the Arab Spring." 2013.
- History. *Arab Spring*. 10 Januari 2018. <https://www.history.com/topics/middle-east/arab-spring> (accessed Juni 15, 2023).
- . *Prague Spring begins in Czechoslovakia*. 9 Februari 2010. <https://www.history.com/this-day-in-history/prague-spring-begins-in-czechoslovakia> (accessed Juni 14, 2023).
- IRC. *Yemen currency devalues to historic lows, exacerbating hunger needs, warns IRC*. 21 Juli 2021. <https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-currency-devalues-historic-lows-exacerbating-hunger-needs-warns-irc> (accessed Juli 13, 2023).
- Juneau, Thomas. "Yemen and the Arab Spring: Elite Struggles, State Collapse and Regional Security." *Orbis*, 2013: 408-423.
- Karasik, Theodore. *The fall of Sanaa: What next for Yemen?* 20 Mei 2020. <https://english.alarabiya.net/views/news/middle-east/2014/09/23/The-fall-of-Sanaa-What-next-for-Yemen-> (accessed Mei 29, 2023).
- Kienle, Eberhard. "Egypt Without Mubarak, Tunisia after Bin Ali: Theory, History and the 'Arab Spring'." *Economy and Society*, 2012: 532-537.
- Kosiewicz, A. *WFP USA*. 25 September 2017. <https://www.wfpusa.org/articles/what-wfp-delivers-general-food-distribution/> (accessed Juni 17, 2023).
- Kronenfield, Sami, and Yoel Guzansky. "Yemen: A Mirror to the Future of the Arab Spring." *Military and Strategic Affairs*, 2014: 79-99.

- Macrotrends.net. *Yemen GNP 1992-2023*. 13 Juli 2023.
<https://www.macrotrends.net/countries/YEM/yemen/gnp-gross-national-product> (accessed Juli 13, 2023).
- Marriot, Jane. *Corruption: a spotlight on Yemen*. 10 Desember 2013.
<https://blogs.fcdo.gov.uk/janemarriott/2013/12/10/corruption-a-spotlight-on-yemen/> (accessed Juni 17, 2023).
- Niaz, Ahmed. "Yemeni Civil War : Causes, Consequences and Prospect." *Dinamika Pemerintahan* , 2019: 82-91.
- OCHA. *Yemen: Humanitarian Snapshot as of 13 September 2011*. 14 September 2011. <https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-snapshot-13-september-2011> (accessed April 4, 2023).
- OCHA, WFP. *Yemen: Food Security Status - 2009 to 2013 (September 2013)*. 5 November 2013. <https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-food-security-status-2009-2013-september-2013> (accessed Maret 28, 2023).
- Oxfam. "Yemen: Fragile lives in hungry times." *Briefing Paper*, 2011: 1-19.
- Phillips, Sarah. *Yemen crisis: A domestic affair made by foreign meddling* . 30 Maret 2015. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/yemen-crisis-domestic-affair-made-worse-foreign-meddling> (accessed Desember 15, 2022).
- Sadewi, Wayan Yulia, Putu Ratih Kumala Dewi, and Adi. P Suwecawangsa. "Hambatan Pemerintah Yaman dalam Mengelola Bantuan Pangan dari World Food Programme Tahun 2011-2016." *DIKSHI (Diskui Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional)*, 2018: 1-13.
- Salisbury, Peter. "Yemen's Economy: Oil, Imports and Elites." *Middle East and North Africa Programme Paper MENA PP 2011/02* , 2011: 1-19.
- SEMC. "Media Covarage In The War In Yemen." 2017: 1-27.
- Septiani, Maya. *Strategi Mewujudkan Transparansi dan Partisipasi dalam Pelayanan Publik*. 31 Januari 2020.
<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-mewujudkan-transparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik> (accessed 2 April, 2023).
- Tree, Thomas. *Food Insecurity and Unrest in the Arab Spring*. 7 September 2014.
<https://www.e-ir.info/2014/09/07/food-insecurity-and-unrest-in-the-arab-spring/> (accessed Desember 15, 2022).
- UNDP. "Transitional Program for Stabilization and Development (TPSD) 2012-2014." <https://www.undp.org/yemen/publications/transitional-program-stabilization-and-development-tpsd-2012-2014>. 14 Juli 2013.
<https://www.undp.org/yemen/publications/transitional-program-stabilization-and-development-tpsd-2012-2014> (accessed Juni 19, 2023).
- WFP . "The State of Food Security and Nutrition in Yemen." *Comprehensive Food Security Survey*, 2012.
- . *Updated Food Security Monitoring Survey Yemen*. 18 November 2013.
<https://reliefweb.int/report/yemen/updated-food-security-monitoring-survey-yemen-final-report-september-2013> (accessed Maret 25, 2023).
- WFP. *Comprehensive Food Security Survey - Yemen*. 18 November 2014.
<https://reliefweb.int/report/yemen/comprehensive-food-security-survey-yemen-november-2014> (accessed Maret 29, 2023).
- . *Yemen*. 2023. <https://www.wfp.org/countries/yemen> (accessed Agustus 2023).

Wilson Center. *Who are Yemen's Houthis?* 7 Juli 2022.

<https://www.wilsoncenter.org/article/who-are-yemens-houthis> (accessed Juni 1, 2023).

Zarina Islam, Ian Christopher N. Rocha, Parvathy Mohanan, Shubhika

Jain, Samarth Goyal, Ana Carla dos Santos Costa, Shoaib

Ahmad, Mohammad Mehedi Hasan, Mohammad Yasir Essar. "Mental Health impacts of Humanitarian crisis on healthcare workers in Yemen."

Medicine, Conflict and Survival, 2021: 112-117.